

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**INOVASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
DALAM PENGELOLAAN WISATA BONO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



SURNI LIASARI

NPM : 157310238

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

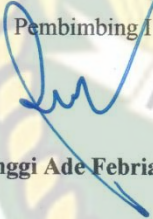
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Surni Lia Sari
NPM : 157310238
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan
Dalam Pengelolaan Wisata Bono

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 09 Februari 2020

Pembimbing I



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing II



Syaprianto, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Budi Mulianto, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Surni Lia Sari
NPM : 157310238
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan
Dalam Pengelolaan Wisata Bono

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 09 Februari 2020

Ketua



Dr.H. Panca Setyo Prihatin,S.IP., M.Si

Sekretaris



Budi Muliando, S.IP., M.Si

Anggota



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I



Dr.H. Panca Setyo Prihatin,S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Surni Lia Sari
NPM : 157310238
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan
Dalam Pengelolaan Wisata Bono.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah

Pekanbaru, 09 Februari 2020
An. Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris


Dr.H. Panca Setyo Prihatin,S.IP., M.Si


Budi Mulianto,S.IP., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Prodi Ilmu Pemerintahan
Ketua


Dr.H.Panca Setyo Prihatin,S.IP.,M.Si


Budi Mulianto,S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Wisata Bono”**. Ini Penulis Tulis Dan Diajukan Ke Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Shalawat serta salam tidak lupa pula di hadiahkan kepada Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyebarkan ajaran agama islam serta mengorbankan segala jiwa dan raganya demi tegaknya Khalimatul Haq di jagat raya ini.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan

bantuan dan dorongan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih terutama kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Syafrinaldi,SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogia M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando,S.IP,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Syaprianto.,S.Sos.,M.IP selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan selama perkuliahan.

7. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga yang telah memberikan izin pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini.
8. Teristimewa dipersembahkan kepada Ayahanda tercinta Ali Usman dan Ibunda tercinta Anjang Reli yang selalu mendoakan, , mendukung, memotivasi dan memberi pengorbanan yang tulus. Dan Abang- abang yang saya cintai Zeprianto, Erizo, Alsyarif, Afriyal, Dasuki Anggara yang terkasih dan adik-adik yang saya sayangi Azriyandi, Idra Liandra yang senantiasa memberikan Doa, semangat, motivasi, dukungan sepenuhnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada sahabat saya Kartika, Kesy , Yulia witri , Dian purnama sari, Nuraini laksmi utami ,Feni desrianti, Annisa akhmalia, aliyah mawaddah Yang memberi semangat,saran serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.Terimakasih juga teman-teman seperjuangan Kelas IP A 2015 atas dukungan yang telah di berikan selama ini,semoga persahabatan kita selalu terjali walaupun jarak memishkan.

Penulis mendoakan jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebutkan diatas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Amin amiin amiin ya rabbal alamiin...

Akhirnya penulis, sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini dan dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, 07 Desember 2019

Penulis

SURNI LIA SARI
NPM 157310238



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Pemerintahan.....	16
2. Fungsi Pemerintah.....	18
3. Konsep Pemerintahan Daerah.....	19
4. Konsep Inovasi.....	21
5. Standar Pelayanan Publik.....	27
6. Konsep Kebijakan Publik.....	29
7. Konsep Pariwisata.....	31
8. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.....	34
9. Konsep Dasa Wisata.....	36
10. Teori Fenomena Pariwisata.....	38
B. Penelitian Terdahulu.....	40
C. Kerangka Pemikiran.....	41
D. Konsep Operasional.....	42
E. Operasionalisasi Variabel.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Key informasi dan Informan	47
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Jadwal Waktu Kegiatan.....	50

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
B. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	54
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.....	56
D. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.....	59

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan	63
B. Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Wisata Bono	66
C. Hambatan-hambatan dalam Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Wisata Bono	90

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94

DAFTAR KEPUSTAKAAN	95
---------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1. Data Pengunjung Objek Wisata Bono.....	10
II.1. Penelitian Terdahulu	40
II.2. Operasional Variabel tentang Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Wisata Bono	45
III.1. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Wisata Bono.....	50
IV.1. Jumlah Penduduk dan Kecamatan di Kabupaten Pelalawan.....	53
V.1. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	63
V.2. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur	64
V.3. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 kerangka pikir	42
IV. Struktur Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.....	54



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Skripsi Penelitian Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Surni LiaSari
NPM : 157310238
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Wisata Bono.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 November 2019

Surni Lia Sari

INOVASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DALAM PENGELOLAAN WISATA BONO ABSTRAK

Oleh

Surni Lia Sari

Kata Kunci : Inovasi, Pemerintah Daerah, Pengelolaan, Pariwisata

Objek wisata Bono di sungai Kampar Teluk Meranti ini sudah lama dikenal oleh masyarakat sekitar dan masyarakat di luar daerah tersebut. Potensi pengembangan salah satu destinasi wisata minat khusus ini sangat besar karena tidak hanya kedatangan peselancar kelas dunia juga mengundang minat keluarga peselancar untuk ikut menikmati keindahan desa Teluk Meranti yang belum banyak tersentuh modernisasi. Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wisata Bono. Adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam inovasi pengembangan objek wisata Bono dan mengetahui faktor penghambat pemerintah daerah dalam inovasi pengembangan objek wisata Bono, dan Apa saja kendala dalam pengembangan wisata bono. Metode dalam Penelitian ini menggunakan teori Sangkala (2013), tipe kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data serta melakukan observasi dan dokumentasi, dan menggunakan teknik Snowball Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Inovasi pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan wisata bono di sungai kampar dapat dikatakan kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari 5 indikator yang telah penulis tetapkan yaitu Layanan Terintegrasi, Desntralisasi Layanan, Pemanfaatan Kerjasama, Pelibatan Warga Negara, Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu, masih kurang perhatian dari Pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata bono, dan masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang terdapat di objek wisata bono.

**INNOVATION OF THE LOCAL GOVERNMENT OF PELALAWAN
REGENCY IN BONO TOURISM MANAGEMENT
ABSTRACT**

By

Surni Lia Sari

Keywords: Innovation, Local Government, Management, Tourism

Bono tourism object in the Kampar Teluk Meranti river has long been known by the surrounding community and people outside the area. The potential for developing one of these special interest tourism destinations is huge because not only the arrival of world-class surfers also invites the interests of surfer families to enjoy the beauty of the village of Teluk Meranti that has not been touched by modernization. Local Government Innovations in Bono Tourism Management. The purpose of this research is to find out how the role of local government in the innovation of Bono tourism object development and to know the inhibiting factors of local government in the innovation of Bono tourism object development, and what are the obstacles in the development of Bono tourism. The method in this study uses the theory of Sangkala (2013), a qualitative type with a descriptive method, which prioritizes the list of interviews as a data collection tool and makes observations and documentation, and uses the Snowball Sampling technique. The results showed that the Pelalawan Regency government innovation in the management of bono tourism in the Kampar river can be said to be less than optimal, this can be seen from the 5 indicators that the authors have established, namely Integrated Services, Service Desntralization, Utilization of Cooperation, Utilization of Citizens, Utilization of Communication Technology and Information. Inhibiting factors in the implementation of this policy are, there is still lack of attention from the local government in the development of bono tourism objects, and the lack of facilities and infrastructure contained in bono attractions.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang belum dikembangkan secara maksimal, termasuk didalamnya di sektor pariwisata. Pembangunan bidang pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi. Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor non migas yang diharapkan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian negara maupun daerah/desa.

Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Pasal 6: Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata). Pasal 8: 1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. 2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11: Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan

kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.) serta (Pasal 12: 1) Aspek- aspek penetapan kawasan strategis pariwisata).

Usaha mengembangkan dunia pariwisata Indonesia ini didukung dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyebutkan keberadaan objek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja mengingat semakin banyaknya pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat. Oleh karena itu pengembangan dan pelaksanaan kepariwisataan harus diupayakan secara terencana. Bertahap dan berkesinambungan setelah melalui pengkajian secara cermat.

Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup andal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Untuk mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Kepariwisataan merupakan bagian yang erat dengan upaya pembangunan ekonomi nasional, dalam tahap pembangunan nasional saat ini pariwisata telah memberikan sumbangan yang besar terhadap negara sebagaimana tercantum dalam GBHN 1993 yang berbunyi : pembangunan pariwisata diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait sehingga lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan. Dahulu `gelombang Bono ditakuti oleh masyarakat Desa Teluk Meranti. Namun, seiring perkembangan wisata selancar Sungai Kampar, masyarakat menyadari pentingnya peranan gelombang Bono dalam menggerakkan perekonomian mereka.

Inovasi Daerah dari Perspektif Regulasi, Konseptual, dan Empiris (Tinjauan terhadap pasal Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat bab yang secara khusus mengatur inovasi daerah. Disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Regulasi ini menjadi pintu bagi daerah untuk melakukan inovasi menjadi semakin jelas. Pasal 386 UU Pemda dengan tegas menyatakan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah

daerah dapat melakukan inovasi. Secara konseptual Rogers (1961) menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Variabel yang berpengaruh terhadap tahapan difusi inovasi tersebut mencakup (1) atribut inovasi, (2) jenis keputusan inovasi, (3) saluran komunikasi, (4) kondisi sistem sosial, dan (5) peran agen perubah. Provinsi Jawa Barat dijadikan sebagai contoh daerah yang berhasil menerapkan inovasi daerah. Ada tiga kategori inovasi, yakni Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Produk Sektoral. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, ditujukan guna meningkatkan Kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik. Sementara Inovasi Pelayanan Publik dirancang untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun Inovasi Produk sektoral dirancang untuk membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan. Keberhasilan ini menghantarkan Gubernur Jawa Barat memperoleh penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif 2017. Jika Provinsi Jawa Barat bisa menerapkan inovasi daerah yang berhasil, kenapa daerah lain masih takut untuk menerapkannya.

Strategi Pengembangan Objek Wisata Bono Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Departemen Kebudayaan Pariwisata Pariwisata dan Olahraga (Disbudparpora) Pelalawan adalah salah satu lembaga pemerintah yang mengalami masalah dengan Objek Wisata Bono di Kabupaten Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata, pariwisata terdiri dari berbagai kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh komunitas bisnis, pemerintah

dan pemerintah daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan Pariwisata berhak mengembangkan objek wisata Bono di Distrik Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Namun masalah yang terjadi adalah infrastruktur transportasi baik di darat maupun di laut mencapai objek wisata Bono masih mengalami kesulitan, terutama pada jalan rusak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengembangkan objek wisata Bono di Kabupaten Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Untuk menganalisis masalah-masalah ini penulis menggunakan teori lena dan lina yaitu teori Strategi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara dengan informan kunci dan snowball sampling untuk menentukan kelanjutan informan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa Strategi Pengembangan Wisata Bono Daya Tarik Kabupaten Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan masih ada banyak kendala, terutama dalam hal kerusakan jalan, infrastruktur dan faktor keuangan (pendanaan). Dengan demikian, fokus Pemerintah harus diprioritaskan dan berkontribusi untuk mengembangkan Objek Wisata Bono di Kabupaten Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

Kendala dan Upaya Pengembangan Objek wisata Bono di Sungai Kampar Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Riau. Objek wisata Bono di sungai Kampar Teluk Meranti ini sudah lama dikenal oleh masyarakat sekitar dan masyarakat ndi luar daerah tersebut. Potensi pengembangan salah satu destinasi wisata minat khusus ini sangat besar karena tidak hanya kedatangan peselancar kelas dunia juga mengundang minat keluarga peselancar untuk ikut menikmati

keindahan desa Teluk Meranti yang belum banyak tersentuh modernisasi. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan data dan menganalisa data tentang : 1) Potensi yang dimiliki oleh objek wisata Bono. 2) Kendala yang dihadapi dalam pengembangan objek wisata Bono. 3) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Bono. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan penelitian langsung lapangan. Hasil dari penelitian di lapangan sebagai berikut : 1) Potensi yang dimiliki objek wisata Bono yaitu Bono sudah menjadi Icon di Propinsi dan Nasional. 2) Kendala yang dihadapi dalam pengembangan objek wisata Bono antara lain: Jalan yg belum di aspal, Villa atau tempat penginapan yang masih kurang memadai, warung tempat makan para wisatawan masih kurang, angkot tidak ada untuk mengangkut para wisatawan. 3) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Bono yaitu mempersiapkan diri mereka dalam rangka memajukan kegiatan pariwisata dengan tidak menghilangkan identitas budaya mereka

Strategi Pengembangan Masyarakat Pesisir Berbasis Pembangunan Wisata Bono(*TidalBore*) di Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan satu fenomena alam yang unik di kecamatan Teluk Meranti yang dikenal dengan sebutan bono (Tidal Bore Surfing), dahulu fenomena ini sangat menakutkan bagi masyarakat karena ombaknya yang sangat besar dan terjadi pada musim-musim tertentu. Namun dewasa ini adalah suatu yang banyak dilirik oleh wisatawan domestik dan mancanegara untuk melaksanakan selancar di atasnya. Sehingga Pemerintah Daerah mengembangkannya menjadi event wisata

daerahnya, sementara masyarakatnya belum sepenuhnya siap untuk itu Lokasi Penelitian dilakukan di Kecamatan Teluk Meranti di Kabupaten Pelalawan. Subyek penelitian ini adalah masyarakat Teluk Meranti yang berstatus nelayan tradisional. Selain Teluk Meranti akan diwawancarai pula beberapa key informan yang terkait masalah pengembangan wisata bono. Analisis data digunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui pendekatan dianalisis dengan model interaktif. Dengan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan hasil/verifikasi secara siklus. Hasil kajian menemukan masyarakat belum sepenuhnya siap dengan pembangunan wisata bono dan terjadi goncangan budaya di kalangan mereka.

Maka dari itu peneliti bermaksud meneliti tentang Bono ini karena sangat bagus dan ingin ditingkatkan lagi.

Bono adalah gelombang atau ombak yang terjadi di Muara [Sungai Kampar](#), [Kabupaten Pelalawan](#), [Provinsi Riau](#), [Indonesia](#). Ombak Bono Sungai Kampar merupakan suatu fenomena alam akibat adanya pertemuan arus sungai menuju laut dan arus laut yang masuk ke sungai akibat pasang.

Muara Sungai Bono yang disebut penduduk sebagai KUALA KAMPAR memiliki ombak Bono yang dapat mencapai ketinggian 6-10 meter terkandung keadaan pada saat kejadian. Menurut cerita Melayu lama berjudul Sentadu Gunung Laut), setiap pendekar Melayu pesisir harus dapat menaklukkan ombak Bono untuk meningkatkan keahlian bertarung mereka. Hal ini dapat masuk akal

karena "mengendarai" Bono intinya adalah menjaga keseimbangan badan, di luar masalah mistis.

Dahulu, karena masih ada sifat mistis di lokasi tersebut, maka untuk mengendarai Bono harus dengan upacara "semah" yang dilakukan pagi atau siang hari. Upacara dipimpin oleh BOMO atau Datuk atau tetua kampung dengan maksud agar pengendara Bono selalu mendapat keselamatan dan dijauhkan dari segala marabahaya. Selain itu ada cerita mistis (mungkin) yang berhubungan dengan gelombang Bono ini yaitu cerita tentang BANJIR DARAH DI MEMPUSUN atau MEMPUSUN BERSIMBAH DARAH dan terbentuknya Kerajaan Pelalawan 1822 Masehi.

Sekarang, masyarakat sekitar Kuala Kampar menganggap Bono sebagai "sahabat alam". Penduduk yang berani akan "mengendarai" Bono dengan sampan mereka tidak dengan menggunakan papan selancar pada umumnya. Mengendarai sampan di atas ombak Bono menjadi suatu kegiatan ketangkasan. Tetapi kegiatan ini memiliki risiko tinggi karena ketika salah mengendarai sampan, maka sampan akan dapat dihempas oleh ombak Bono, tak jarang yang sampannya hancur berkeping-keping.

Biasanya ombak atau gelombang hanya terjadi di tepi pantai atau laut ataupun danau yang luas akibat perubahan arus air dan angin. Ombak yang berukuran cukup besar banyak dimanfaatkan untuk bermain selancar. Maka, jika melihat orang berselancar di pantai adalah suatu hal yang sudah biasa. Tetapi melihat orang berselancar di arus sungai adalah suatu hal yang luar biasa

Objek wisata Bono di sungai kampar Teluk Meranti ini sudah lama dikenal masyarakat sekitarnya. Potensi pengembangan salah satu destinasi wisata minat khusus ini sangat besar karena tidak hanya kedatangan peselancar kelas dunia juga mengundang minat keluarga peselancar untuk ikut menikmati keindahan Desa Teluk Meranti yang belum banyak tersentuh modernisasi.

Nama bono dalam bahasa masyarakat setempat berarti benar. Kata ini memiliki kisahnya sendiri ketika Raja Pelalawan meminta utusan masyarakat setempat menghadap ke Istana Sayap tetapi sang utusan terhalang oleh gelombang untuk menyeberang sungai. Karena ketidakhadiran utusan tersebut, kemudian sang raja memerintahkan pengecekan langsung apakah betul ada gelombang dahsyat di sungai. Akhirnya diperoleh informasi bahwa hal tersebut benar adanya. Kata 'benar' ini dalam bahasa setempat disebut 'bono' dan sejak saat itu kata 'bono' melekat pada gelombang sungai di Teluk Meranti.

Bono merupakan fenomena alam yang karena kondisi di muara sungainya terjadi pendangkalan berat sehingga ketika air pasang datang dari laut, air pasang tidak dapat bergerak ke hulu dengan lancar namun tercegah oleh endapan dan bentuk muara sungai yang menguncup. Bono merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh gelombang pasang surut yang bertemu dengan arus Sungai Kampar. Kondisi muara yang berbentuk 'V' memungkinkan pertemuan kedua macam arus tersebut, yaitu arus pasang dan arus sungai dari hulu, membangkitkan terbentuknya Bono. Gelombang Bono termasuk dalam kategori Tidal Borel, yaitu fenomena hidrodinamika yang terkait dengan pergerakan massa air dimana gelombang pasang menjalar menuju ke hulu dengan kekuatan yang bersifat

merusak. Tidak semua muara sungai ataupun teluk bisa membangkitkan gelombang pasang semacam Bono.

Keunikan pariwisata Bono ini terjadi di daerah aliran sungai. Bono merupakan fenomena alam unik yang terjadi di Sungai Kampar Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Bono adalah fenomena alam yang datang sebelum pasang. Air laut mengalir masuk dan bertemu dengan air sungai Kampar sehingga terjadi gelombang dengan kecepatan yang cukup tinggi, dan menghasilkan suara seperti suara guntur dan suara angin kencang.

Menurut Berger, masyarakat merupakan kenyataan objektif sekaligus subjektif. Dikatakan sebagai kenyataan objektif ketika masyarakat berada di luar diri manusia dan berhadap-hadapan dengannya. Sedangkan sebagai kenyataan subjektif ketika individu berada dalam masyarakat itu sebagai bagian tak terpisahkan. Dengan kata lain individu mempengaruhi masyarakat dan masyarakat mempengaruhi individu. Karena itu kenyataan sosial menurut Berger bersifat ganda, objektif dan subjektif. Dalam upaya untuk menghubungkan yang subjektif dan objektif itu, Berger menemukan suatu konsep dialektika, yang biasa dikenal dengan istilah Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi.

Walaupun kondisi dari wisata Bono memiliki berbagai kekurangan dalam memberikan pelayanan bagi para pengunjung, karena objek wisata ini satu-satunya yang menjadi andalan objek wisata. masyarakat Pelalawan dan sekitarnya, Wisata Bono ini tetap dikunjungi para pengunjung Potensi untuk terjadinya peningkatan arus wisatawan sangat terbuka dengan adanya usaha pengembangan yang terarah, dengan melihat potensi yang ada didaerah tersebut. Terjadinya

peningkatan jumlah arus wisatawan jelas akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Jika hal tersebut terjadi, kontribusi terhadap PAD Kabupaten Pelalawan akan dapat terwujud. Karena selama ini belum adanya sedikitpun kontribusi Objek Wisata Bono terhadap PAD Kabupaten Pelalawan.

Diharapkan dengan adanya pengembangan pada kawasan ini dapat menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Pelalawan pada umumnya dan masyarakat Teluk Meranti pada khususnya.

Tabel I.1 :Jumlah kunjungan wisatawan ke wisata Bono Kabupaten Pelalawan Lima tahun Terakhir Tahun 2013 s.d 2019

Tahun	Jumlah Pengunjung	
	Domestik	Mancanegara
2013	13	125
2014	234	67
2015	5.752	86
2016	1.079	2
2017	937	24
2018	21.479	219
2019	11.520	26
Jumlah	41.014	549

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan

Jika dilihat dari tabel diatas, pada tahun 2013 jumlah pengunjung Wisatawan Mancanegara berjumlah sebanyak 125 orang dan Wisatawan Domestik berjumlah sebanyak 13 orang. Pada tahun berikutnya yaitu pada 2014 jumlah Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke lokasi wisata Bono yaitu berjumlah sebanyak 67 orang dan Wisatawan Domestik yaitu berjumlah sebanyak 234 orang. Pada tahun 2015 Wisatawan Mancanegara yaitu sebanyak 86 orang dan Wisatawan Domestik berjumlah 5.752. pada tahun berikutnya 2016 Wisatawan Mancanegara berjumlah 2 orang dan jumlah wisatawan domestik berjumlah 1.079. dan pada tahun 2017 jumlah wisatawan mancanegara berjumlah 24 orang dan jumlah wisatawan domestik berjumlah 937 orang. Dan pada tahun 2018 wisatawan mancanegara berjumlah 219 orang dan untuk wisatawan domestik berjumlah 21.479 orang. Dan pada tahun 2019 wisatawan mancanegara berjumlah 26 orang dan untuk wisatawan domestik berjumlah 11.520 orang. Maka hasil dari keseluruhan dari tahun 2013 sampai 2019 dari jumlah wisatawan domestik berjumlah 41.014 dan untuk hasil keseluruhan jumlah wisatawan mancanegara dari tahun 2013 sampai 2019 berjumlah 549 orang.

Adapun kebijakan-kebijakan atau peran dalam pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupten Pelalawan yaitu berdasarkan Perda Kabupaten Pelalawan No. 22 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kesenian, Dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan.

1. Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan
2. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kabupaten Pelalawan dan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 27 Tahun 2016

Walaupun pemerintah sudah melakukan berbagai usaha dan terobosan baru dengan melahirkan berbagai ide dan kebijaksanaan seperti membangun jalan untuk menuju ke objek wisata dan membangun sarana dan prasarana, namun ternyata dalam dunia kepariwisataan indonesia sebagaimana kondisi yang lainnya yang terdapat di negara-negara berkembang pada umumnya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan kendala yang perlu dibenahi secara serius. Seperti yang terdapat pada objek wisata Bono di Teluk Meranti ini banyak sekali unsur penghambat atau kendala yang ditemui dalam usaha pengembangannya sehingga

fasilitas yang dibutuhkan dalam usaha pengembangannya juga tidak ditemui pada objek wisata tersebut.

Fasilitas itu berupa, jalan belum memadai dan kecil, untuk transportasi menuju ketempat pariwisata Bono tersebut. Selain itu, sarana transportasi berupa angkot untuk membawa wisatawan kesana tidak ada dan hanya bisa menggunakan transportasi pribadi kemudian villa atau tempat penginapan bagi wisatawan asing masih kurang, serta masih kurangnya warung-warung tempat makan bagi wisatawan. Hal lain yang tidak ada kursi-kursi untuk tempat santai.

Berdasarkan observasi di lapangan, Kecamatan Teluk Meranti mempunyai potensi di bidang pariwisata, potensi Bono ini memiliki gelombang yang merupakan endapan seperti lumpur dan pasir dasar sungai kuala kampar yang menggulung besar yang berada di daerah aliran sungai kampar dan sangat diminati oleh para peselancar kelas dunia untuk memecahkan rekor dunia dalam hal berselancar dengan jarak terjauh dan dalam waktu terlama. Keunikan dari fenomena gelombang Bono ini sudah merupakan nilai positif tersendiri, potensi tersebut perlu dibenahi dan dikembangkan untuk menarik perhatian para wisatawan baik Nasional maupun Internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan dan uraian di atas. Maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian ini yaitu : Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengembangkan objek wisata bono ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas kurangnya bagaimana peran pemerintah daerah dalam inovasi pengembangan wisata bono.

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam inovasi pengembangan objek wisata Bono.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pemerintah daerah dalam inovasi pengembangan objek wisata Bono.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya teoritis terutama tentang konsep-konsep kerja organisasi dengan kenyataan empiris yang dilapangan dan dan guna untuk mendapatkan topik penelitian yang penulis lakukan.
2. Kegunaan Praktis, sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga dan persendian kabupaten pelalawan.
3. Kegunaan Akademis, sebgai sumbangan pemikiran peneliti yang lain dalam kajian penelitian yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

1.1 Pengertian Pemerintahan

Agar penelitian ini mengandung unsur penelitian ilmiah, maka berikut ini dikemukakan beberapa konsep teoritis yang dianggap ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam ilmu Negara, ilmu politik dikenal dengan istilah pemerintahan, sedangkan kegiatan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan Negara biasanya disebut dengan pemerintahan.

Kata pemerintahan berasal dari kata dasar perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki 4 unsur yaitu terdiri dari dua pihak unsur yang diperintah yaitu rakyat, unsur pemerintah itu sendiri dan antar keduanya da hubungan. Setelah mendapat awalan “pe” menjadi pemerinah yang berarti badan atau organisasi mengurus. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan dan menjadi perbuatan, cara atau perihal (Syafiee dan Andi Azikin, 2008: 15).

Pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan sehingga banyak penyebutan dari negara lain yakni inggris menyebutnya “*Government*” dan perancis menyebut “*Gouvernement*”, keduanya berasal dari perkataan latin “*Gubernacalum*”. Dalam bahasa arab disebut “*Hukumat*”, di amerika serikat disebut “*Administration*” sedangkan belanda mengartikan “*Regering*” sebagai pengguna kekuasaan dan bijaksana dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan

sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah. Dalam Regering digunakan untuk pemerintah pada tingkat nasional sedangkan Bestuur adalah sebagai keseluruhan badan pemerintah dan kegiatannya yang langsung berhubung dengan usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat (Inu Kencana Syafiie, 2013).

Menurut C.F. Strong (1960) mengatakan bahwa pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkat perang, kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau pembuatan undang-undang dan ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan serta dalam penyelenggaraan kepentingan negara (Inu Kencana Syafiie, 2013).

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1986:12) pemerintahan adalah perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat terganggu dari beberapa hal, diantaranya adalah filsafat hidup masyarakat dan filsafat politik masyarakat (Inu Kencana Syafiie, 2013).

Menurut Rasyid (2001:14-16) mengatakan bahwa pokok-poko pemerintahan, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga susatu sistem ketertiban didalam masyarakat biasanya menjalankan kehidupan secara wajar, pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

Menurut Kitab Suci Al-Quran pemerintahan adalah segolongan umat yang mengajak kepada kabaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang dari buruk, itulah orang yang beruntung.

Berdasarkan definis yang diatas,jadi pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah malakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengoordinasikan, pemimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

2. Fungsi Pemerintahan

Fungsi pemerintahan menurut The Liang Gie dalam Tangkilisan (2005;43) adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaanya ataupun pertimbangan lainnya. Selanjutnya dia mengatakan bahwa untuk melakukan suatu usaha kerja sama, aktivitas-aktivitas yang sama jenisnya itu biasanya digabung menjadi satu kesatuan dan diserahkan pada tanggungjawab seorang pejabat atau satuan organisasi.

Kemudian Rasyid(2010:32) mengklarifikasikan dari fungsi-fungsi pokok pemerintahan diatas menjadi tiga fungsi yaitu :

1. Fungsi Pelayanan (service)

Fungsi utama pemerintahan adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Fungsi ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh Negara di dunia.

2. Fungsi Pemberdayaan (empowerment)

fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar zona aman (comfort zone). Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintahan akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan.

3. Fungsi Pembangunan (development)

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera)

3. Konsep Pemerintahan Daerah

Dalam memahami makna konsep pemerintahan daerah perlu dicermati 3(tiga) hal penting berkaitan dengan lingkup istilah pemerintahan daerah, yaitu: pertama berkaitan dengan dimensi pengertian, kedua berkaitan dengan bentuk pemerintahan daerah dan ketiga berkenaan lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah.

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti

pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahandaerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (local government atau local authority). Pemerintahan lokal pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan.

Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Pemerintahan daerah (local government) hanya melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Jadi bukan fungsi legislatif seperti halnya fungsi parlemen di mana dalam konteks Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan

fungsi yudikatif dipegang oleh badan-badan peradilan (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan lainnya) Hoessein berpendapat Istilah legislatif dan eksekutif juga tidak lazim digunakan pada local government. Istilah yang lazim digunakan pada local government adalah fungsi pembuatan kebijakan (policy making function) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (policy executing function). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal.

4. Konsep Inovasi

4.1 Pengertian Inovasi

Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut Suryani, Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya sebatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Namun, menurut Ranggi, kata inovasi dapat diartikan sebagai “Proses” atau “Hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti.

Secara umum inovasi seringkali diterjemahkan sebagai penemuan baru, namun sebenarnya aspek “kebaruan” dalam inovasi sangat ditekankan untuk inovasi sektor swasta. Sedangkan, inovasi pada sektor publik lebih ditekankan pada aspek “perbaikan” yang dihasilkan dari kegiatan inovasi tersebut, yaitu

pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien, dan berkualitas, murah dan terjangkau.

Borins (dalam Sangkala, 2013:25) menyatakan bahwa dalam literature inovasi terdapat perbedaan antara temuan (invention), kreasi ide baru, dan inovasi. Dalam literature manajemen juga dikemukakan sejumlah defenisi inovasi dimana cara luas berada dalam tema-tema perubahan proses atau teknologi yang menciptakan nilai bagi pelanggan atau organisasi. Inovasi yang berbeda tersebut lebih kepada semata-mata perubahan. Halversen (dalam Sangkala, 2013:26) mendefenisikan inovasi dalam pengertian yang agak luas sebagai “perubahan dalam perilaku” Halversen menyatakan bahwa tidak ada satupun defenisi yang mampu memberikan pemahaman inovasi didalam evolusi yang konstan

Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut Suryani(2008), inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebgai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami.

Namun demikian, dalam konteks pemasaran dan konteks perilaku konsumen inovasi dikaitkan dengan produk atau jasa yang sifatnya baru. Baru untuk merujuk pada produk yang memang benar-benar belum pernah ada sebelumnya dipasar dan baru dalam arti ada hal yang berbeda yang merupakan

penyempurnaan atau perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah ditemui konsumen dipasar.

Kata inovasi dapat diartikan sebagai “Proses” atau “Hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti. Menurut Rosenfeld dalam Sutarno (2012), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.

Sedangkan menurut Mitra pada buku tersebut dan pada halaman yang sama, bahwa inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis, dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru. Namun menurut Vontana, inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat dikenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransfermasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antar nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, masyarakat, dan lingkungan.

Osborne & Brown, menyatakan bahwa inovasi merupakan representasi dari ketidakberlanjutan kondisi dimasa yang lalu. Ketidakberlanjutan ini menjadi karakteristik yang membedakan inovasi dari perubahan. Lebih lanjut dikatakan inovasi adalah pengenalan terhadap elemen baru kedalam pelayanan organisasi dalam bentuk sebuah pengetahuan baru, organisasi baru manajemen atau

keterampilan proses yang baru. Kemudian, Pugh dalam Rahayu: menyatakan inovasi adalah sebuah pengenalan atas fitur baru dalam organisasi. Inovasi dicerminkan oleh produk-produk dan proses produksi baru kemajuan dalam teknologi komunikasi, organisasi, dan layanan baru di sektor publik dan sektor non-profit. Dalam halaman yang sama, Daft: menyatakan bahwa inovasi organisasi berkaitan dengan adopsi sebuah idea atau perilaku yang sifatnya baru. Bagi organisasi yang mengadopsinya. Secara lebih khusus, inovasi didefinisikan sebagai sebuah awal penggunaan ide oleh sebuah organisasi yang tujuannya sama.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa inovasi memiliki nilai tambah karena keterbaruan yang dibawa kedalam organisasi. Inovasi merupakan hasil kerja dari *knowing* dibandingkan *doing*. Inovasi dapat dilakukan secara efektif dengan memperhatikan aspek utama dalam organisasi, Ducker dalam Rahayu: mengatakan Proses ini tidak hanya mengidentifikasi kesempatan yang menarik tetapi juga membutuhkan seorang individu untuk mencapai respon yang disebut sebagai *Fuctional inspiration*.

Menurut Yogi dalam LAN (2007), inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian inovasi sendiri sangat beragam, dan dari banyak perspektif. Menurut Rogers dalam LAN 13(2007) menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Sedangkan menurut Damanpour bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produk yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.

Menurut Rogers dalam LAN (2007) mengatakan bahwa inovasi mempunyai atribut sebagai berikut:

1. Keuntungan Relatif : Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.
2. Kesesuaian : Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.
3. Kerumitan : Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namundemikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.
4. Kemungkinan Dicoba : Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.
5. Kemudahan diamati : Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana sebuah inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa inovasi merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sebelumnya berupa hasil pemikiran dan ide yang dapat dikembangkan juga diimplementasikan agar dirasakan manfaatnya, dan juga bahwa inovasi erat kaitannya dengan perubahan yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa inovasi menjadi satu

kunci yang bisa digunakan oleh organisasi dalam menghadapi sebuah perubahan. Organisasi akan berbicara mengenai bagaimana poin-poin keterbaruan yang menjadi karakter inovasi dapat dikembangkan secara keseluruhan melalui perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan kontrol sehingga dapat menghubungkan semua aspek organisasi.

Faktor penghambat inovasi sebuah inovasi biasanya menghadapi berbagai hambatan dan sulit diterima oleh masyarakat. Olehnya itu menurut Ibrahim, 1988, faktor penghambat inovasi antara lain.

1. Estimasi tidak tepat terhadap inovasi : Disebabkan oleh tidak tepatnya perencanaan atau estimasi dalam proses difusi inovasi, antara lain tidak tepat dalam mempertimbangkan implementasi inovasi, kurang adanya kerja sama antar pelaksana inovasi, tidak adanya persamaan pendapat tentang tujuan yang akan dicapai, tidak jelas struktur pengambilan keputusan, komunikasi yang tidak lancar, adanya tekanan dari pemerintah untuk mempercepat hasil inovasi dalam waktu yang sangat singkat.
2. Konflik dan motivasi : Disebabkan oleh karena adanya masalah-masalah pribadi seperti pertentangan antara anggota tim, rasa iri antara anggota, ada anggota tim yang tidak semangat kerja, pimpinan terlalu kaku dan berpandangan sempit, kurang adanya penguatan atau hadiah terhadap anggota yang melaksanakan tugas dengan baik.
3. Inovasi tidak berkembang : Tidak ada upaya untuk mengembangkan inovasi disebabkan oleh lambatnya material yang diterima, alokasi dana yang tidak tepat, terjadi inflasi, pergantian pengurus yang terlalu cepat.

4. Masalah keuangan : Tidak memadainya dana dari pemerintah, kondisi perekonomian secara nasional mengakibatkan penundaan penyampaian dana.
5. Penolakan inovasi dari kelompok tertentu : Pro dan kontra dalam memandang inovasi selalu mewarnai kehadiran sebuah inovasi bahkan dapat menggiring opini masyarakat sehingga curiga dengan inovasi tersebut.
6. Kurang adanya hubungan sosial : Hubungan dimaksudkan disini adalah hubungan antara anggota kelompok pelaksana dan hubungan dengan masyarakat.

4.2 Strategi Inovasi Dalam Pemerintahan

Inovasi dan analisis praktek yang sukses menurut sangkala (2013) menunjukkan ada lima strategi utama didalam sektor pemerintahan yaitu :

- 1) Layanan terintegrasi, dimana sektor publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan. Kewenangan publik seringkali menginterasikan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka.
- 2) Desentralisasi pemberian layanan dan monitoring layanan, akan membawa layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis. Desentraisasi layanan mendorong pengembangan ekonomi baru. Desentralisasi layanan meningkatkan partisipasi warga dan meningkatkan kepercayaan dalam pemerintahan.

- 3) Pemanfaatan kerjasama, bermakna sebagai pemerintah yang inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga terjadi kerjasama antar publik dan swasta.
- 4) Pelibatan warga negara, kewenangan pemerintah yang inovatif harus merealisasikan peran pentingnya dengan mendorong peran warga untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan. Ketika pemerintah menyediakan forum bagi publik untuk mengepresikan pandangannya dan terlibat didalam seluruh langkah-langkah proses, maka hasil inovasi lebih memiliki kemungkinan untuk sukses dan lebih luas jangkauannya. Pendekatan partisipasi memungkinkan warga mengungkapkan kebutuhan dan opininya terhadap proposal teknis dan memfasilitasi penerapan proyek yang diberikan dan memastikan kesuksesan yang berkelanjutan dari sebuah inovasi perubahan.
- 5) Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. *United nation world publik sector Report* tahun 2004 mencatat penggunaan layanan berbasis internet untuk memotong red tape dengan cepat keseluruh sektor publik. Kontribusi internet untuk menyederhanakan dan memperbaiki cara warga negara memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan entitas publik.

5. Standar Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan.

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2004 dalam Ratminto dan Atik (2005:23) tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan harus meliputi:

1. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini antara lain kesederhanaan, yaitu kemudahan dalam memenuhi persyaratan.

2. Waktu Penyelesaian

Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan waktu penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan lamanya waktu layanan masing-masing.

3. Biaya Pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian dalam proses pemberian pelayanan, haruslah dengan pengenaan biaya yang secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

4. Produk Layanan

Hasil layanan yang diterima harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan yaitu hasil pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

5. Sarana dan Prasarana

Penyedia sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat penunjang pelayanan yang memadai serta adanya kemudahan dan kenyamanan dalam memperoleh suatu pelayanan.

6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Kompetensi petugas memberi pelayanan harus ditetapkan dengan tetap berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab petugas pelayanan seperti pengetahuan, kedisiplinan, kesopanan, dalam memberikan pelayanan.

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, standar pelayanan adalah ukuran kualitas pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap masyarakat sebagai kewajiban dan janji yang berkualitas, juga dinilai dari ketersediaan waktu yang tepat, biaya pelayanan, menikmati produk pelayanan yang memuaskan yang didukung oleh sarana dan prasarana.

6. Konsep Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu Ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang

terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho(2008:58), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan

perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa

7. Konsep Pariwisata

Secara etimologis, kata “pariwisata” diidentikkan dengan kata “travel” dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ke tempat lain. Atas dasar itu pula dengan melihat situasi dan kondisi saat ini pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan terencana yang dilakukan secara individu atau kelompok dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan (Wardiyanto, 2010).

Selain itu ada bermacam pengertian lain mengenai pariwisata yaitu menyatakan bahwa pariwisata adalah : *“A composite of activities, services and industries that delivers a travel experience, transportation, activity and other hospitality service available for individuals or group that are away from home”*. Dari definisi tersebut menyatakan bahwa pariwisata adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan wisatawan baik individu maupun berkelompok dengan menikmati jasa dan industri pariwisata, transportasi, akomodasi, restoran, hiburan dan sebagainya (Mulyadi dan Nurhayati, 2002). Hunziker dan Kraft (Yoeti, 2001) mengemukakan definisi pariwisata dengan batasan yang lebih bersifat teknis yang diterima secara *official oleh The Association Experts Scientific Internationale des Experts Scientifique du Tourisme (AIEST)*, batasan yang diberikan sebagai berikut

: *“Tourism is the sum of the phenomenom and relationships arising from the travel and stay of non resident, in so far as they do not lead to permanent residence and are not connected with any earning activity”* (pariwisata adalah gabungan dari gejala dan hubunganhubungan yang muncul dari adanya perjalanan dan tinggal sementara dari orangorang yang bukan penduduk setempat, sejauh mereka tidak menunjukkan keinginan untuk menetap dan sejauh mereka tidak berhubungan dengan kegiatan yang menghasilkan uang).

Wahab (1975) merumuskan pengertian pariwisata sebagai berikut : *“A Propeseful human activity that serves as a link between people either within one some country or beyond the geographical limits the states. It involves the temporary displacement of people to another region, country or continent for the satisfaction of varied needs other than exercising a renumerated function”* (Suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri/diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap).

Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, disebutkan pengertian pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Seseorang yang melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah biasanya karena ingin sekedar untuk refreshing dan sekedar untuk berjalan-jalan. Selain itu,

ada juga yang melakukan perjalanan wisata karena ada urusan bisnis ke suatu daerah. Ada berbagai jenis pariwisata yang dikelompokkan berdasarkan tujuan atau motif seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata. Berikut jenis-jenis Pariwisata menurut Spillane (1987) :

1. Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism) Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, atau bahkan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota.
2. Pariwisata untuk Rekreasi (Recreation Tourism) Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya.
3. Pariwisata untuk Kebudayaan (Cultural Tourism) Jenis pariwisata ini dilakukan karena adanya keinginan untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat daerah lain selain itu untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, atau untuk ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater, tarian rakyat, dan lain-lain.
4. Pariwisata untuk Olahraga (Sports Tourism) Jenis ini dapat dibagi dalam dua kategori :

- a. *Big Sports Event*, pariwisata yang dilakukan karena adanya peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti *Olympiade Games, World Cup*, dan lainlain.
 - b. *Sporting Tourism of the Practitioner*, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekan sendiri, seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, dan lain-lain.
5. Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (Business Tourism) Perjalanan usaha ini adalah bentuk profesional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada pelakunya baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan.
6. Pariwisata untuk Berkonvensi (Convention Tourism) Konvensi sering dihadiri oleh ratusan dan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal beberapa hari di kota atau negara penyelenggara.

8. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan menurut The World Conservation Union (WCU) adalah proses pembangunan suatu tempat atau daerah tanpa mengurangi nilai guna dari sumber daya yang sudah ada. Secara umum hal ini dapat dicapai dengan pengawasan dan pemeliharaan terhadap sumber-sumber daya yang sekarang ada, agar dapat dinikmati untuk masa yang akan datang. Pembangunan kepariwisataan bertahan lama menghubungkan wisatawan sebagai penyokong dana terhadap fasilitas pariwisata dengan pemeliharaan lingkungan.

Menurut *World Commicion on Environment and Development* konsep pariwisata berkelanjutan adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan yang

memperhatikan kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan (hidup) generasi penerus di waktu yang akan datang. Arti lebih jauh, dalam pembangunan hendaknya jangan menghabiskan atau menguras sumber daya pariwisata untuk jangka pendek, tetapi harus memperhatikan kelanjutan pembangunan pariwisata jangka panjang di waktu yang akan datang.

Daya dukung (carring capacity) adalah kunci bagi pengembangan kepariwisataan bertahan lama (sustainable tourism). Konsep ini mengacu pada penggunaan secara maksimal dari suatu daya tarik wisata tanpa mengakibatkan kerusakan sumber-sumber yang ada, yang dapat mengurangi kepuasan turis atau menambah masalah sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Prinsip lain dari sustainable tourism yang juga kurang lebih sama dengan konsep-konsep yang sudah ditulis sebelumnya antara lain :

1. Lingkungan hidup mempunyai nilai yang tersirat sebagai asset dari pariwisata, yang keberadaannya harus dipertimbangkan untuk jangka panjang.
2. Kepariwisataan harus dapat dikenalkan sebagai aktivitas yang positif yang dapat memberikan keuntungan yang potensial kepada masyarakat di tempat-tempat lain disekitarnya.
3. Hubungan antara pariwisata dan lingkungan harus dikelola sehingga lingkungan hidup dapat bertahan untuk jangka panjang dan kegiatan pariwisata tidak boleh membawa dampak yang tidak diharapkan.

4. Kegiatan kepariwisataan dan pengembangan-pengembangannya harus mempertimbangkan derajat kealamian dan karakter dari tempat dimana mereka berlokasi.
5. Keserasian antara kebutuhan wisatawan, tempat, dan penduduk sekitar harus dicari dan dipertemukan.

9. Konsep Desa Wisata

Desa wisata merupakan sebuah bentuk penyesuaian antara akomodasi, atraksi dan fasilitas yang mendukung untuk disajikan pada suatu struktur yang menyatu pada kehidupan masyarakat. Dengan tata cara yang berbeda dan tradisi yang berlaku. Perkembangan jaman yang begitu cepat mempengaruhi suatu daerah untuk membangun desanya sebagai tempat wisata, sekalipun mereka belum memiliki konsepnya. Oleh karena itu memiliki desa wisata yang menarik harus mempunyai konsep yang baik pula. Konsep yang matang itulah yang diperlukan untuk menciptakan desa [wisata](#) yang menarik untuk dikunjungi.

Memang beberapa hal perlu dipersiapkan agar konsep tersebut berjalan dengan baik. Semua kembali pada orang-orang yang mengelola hal tersebut. Dengan perencanaan yang matang, maka tidak akan susah untuk dilaksanakan. Karena membangun sebuah desa wisata harus mempertimbangkan kelayakan desa tersebut untuk dijadikan sebuah desa wisata.

a. Situasi Sosial

Didalam masyarakat, sebuah komunikasi yang baik untuk pendatang merupakan hal yang utama. Karena dengan begitu akan menciptakan kenyamanan

bagi pengunjung desa wisata. Dengan adanya pemandu wisata akan menjadi nilai tambah dan perlu untuk dipertahankan. Pemandu wisata akan sangat membantu dalam memberikan pengetahuan terhadap desa wisata tersebut. Sejarah sebuah desa juga akan sangat menarik untuk diperbincangkan dan menjadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan. Dapat pula menjadi alternatif para pengunjung untuk menemukan penginapan, jaringan komunikasi, dan makanan yang terbaik untuk para wisatawan.

b. Inovasi

Dengan perkembangan jaman yang semakin hari semakin membutuhkan pembaruan, maka dari itu pertumbuhan sebuah desa juga memerlukan konsep yang menarik dari hari ke hari agar para wisatawan tidak jenuh dengan keadaan desa wisata yang itu-itu saja. Sehingga konsep sebuah desa wisata akan terasa segar dan akan terus menawarkan hal yang baru. Pengelola juga harus melakukan pembaruan atau inovasi agar selalu terlihat menarik untuk dikunjungi. Oleh sebab itu sebuah desa wisata harus memiliki pengembangan konsep untuk terus bergerak dalam pembaruan agar wisatawan yang pernah datang, akan datang dan terus datang lagi.

c. Keamanan

Tanpa keamanan maka tidak akan tercipta kenyamanan. Dengan membuat desa wisata yang aman maka akan menciptakan kenyamanan untuk wisatawan. Ini menjadi salah satu daya tarik yang kuat jika sebuah desa wisata aman. Dan konsep desa wisata harus menjadikan keamanan adalah prioritas utama. Karena semua

wisatawan menginginkan keamanan demi kenyamanan mereka. Hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya tindak kriminal yang membuat wisatawan terganggu akan hal itu. Entah itu dari warga setempat atau pun dari luar desa. Dengan menjaga keamanan dengan baik akan menciptakan kenyamanan yang membuat wisatawan betah dan akan datang kembali nantinya. Dengan meninggalkan kesan yang baik untuk wisatawan maka akan mengundang wisatawan-wisatawan yang lain yang lebih banyak lagi.

10. Teori dan Fenomena Pariwisata

a. Teori Inovasi Pariwisata :

Pertama : Menurut Cox(1985, dalam Dowling dan Fennel 2003: 2) pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
2. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktifitas pariwisata tersebut

jika melampaui ambang batas(*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun disisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kedua : Pengertian prasarana menurut ketentuan umum permendiknas (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional) No. 24 tahun 2007. Prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik atau segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Sesuai dengan pengertian prasarana diatas maka prasarana pengelolaan objek wisata Bono tentang studi pengelolaan objek wisata Bono bagi masyarakat Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan berkategori kurang baik dengan persentase 54,93%, dikatakan kurang baik karena kenyamanan transportasi objek wisata Bono, alat komunikasi di sekitar objek wisata Bono dan tempat belanja di sekitar objek wisata Bono kurang memadai.

Ketiga : Pengertian sarana menurut ketentuan umum permendiknas (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional) No. 24 tahun 2007. Prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik atau segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan organisasi kerja. Sarana pariwisata adalah perusahaan perusahaanaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Jenis	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian
Heryanto Syahputra (Jom FISIP Volume 2 No 1- Februari 2015)	Skripsi	Strategi Pengembangan Objek Wisata Bono Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan	- Tipe penelitian sama-sama menggunakan Kualitatif	Bentuk judul Strategi Pengembangan	Bentuk judul Upaya Pengelolaan/pengembangan
Slamet Rianto dan Santri (2014)	Skripsi	Kendala dan Upaya Pengembangan Objek Wisata Bono di Sungai Kampar Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Riau	- Tipe penelitian sama-sama menggunakan Kualitatif	Teknik pengumpulan data 1. Wawancara 2. Observasi. 3. Penyelidikan mendalam	Teknik pengumpulan data 1. Wawancara 2. Dokumentasi 3. Observasi
Telsya Aprilia Kartika (JOM FISIP Vol.3 No.2– Oktober 2016)	Skripsi	Atraksi Wisata Budaya Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Desa Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan	- Tipe penelitian sama-sama menggunakan Kualitatif	Teknik pengumpulan data 1. Wawancara 2. Observasi. 3. Dokumentasi	Teknik pengumpulan data 1. Wawancara 2. Dokumentasi 3. Observasi

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

C. Kerangka Pemikiran

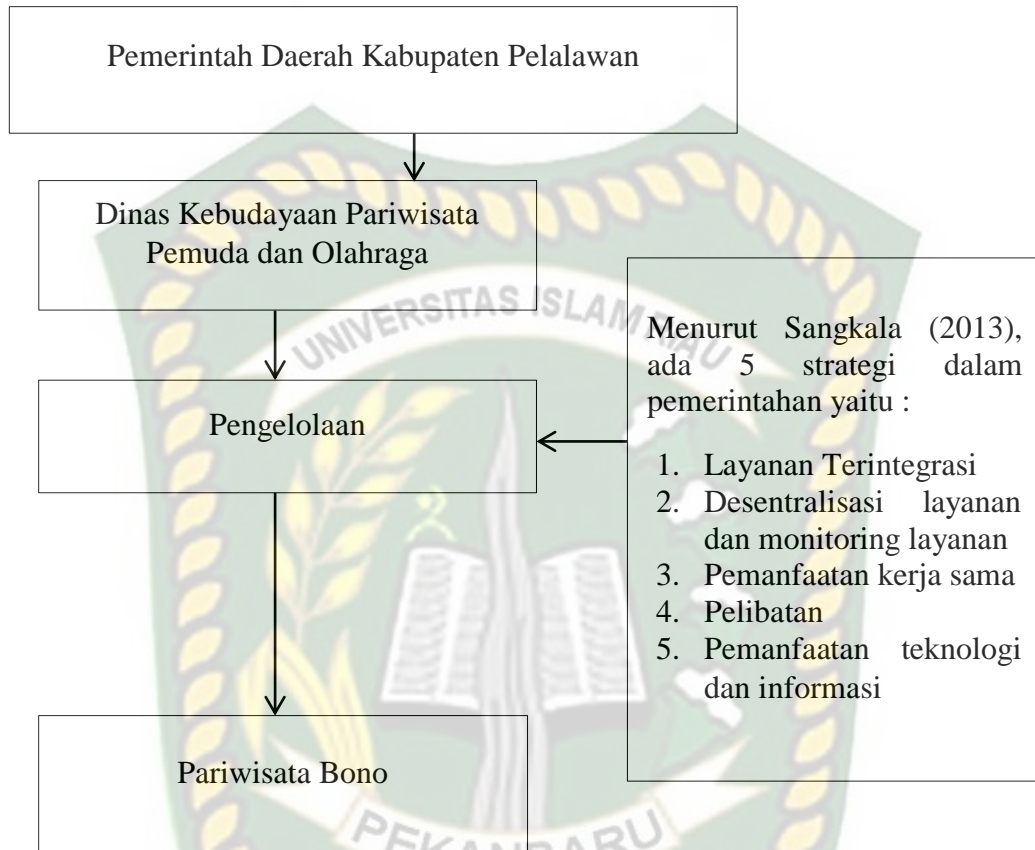
Dalam upaya melakukan pengembangan pariwisata pemerintah memiliki peranan sentral yang antara lain diwujudkan dalam bentuk meningkatkan Bergeraknya sektor dan kegiatan yang dapat mendukung serta menciptakan suasana yang kondusif bagi berjalannya industri kepariwisataan di suatu daerah atau kawasan pariwisata.

Berikut ini fungsi dari penelitian di pariwisata daerah tersebut :

- a. Untuk mengetahui potensi yang dimiliki kawasan objek wisata Bono sebagai daya tarik wisata sungai kampar.
- b. Untuk menganalisis strategi pengembangan kawasan objek wisata Bono sebagai daya tarik wisata.

Berdasarkan kedua fungsi tersebut penulis akan meneliti keduanya yakni Inovasi pemerintahan daerah kabupaten pelalawan dalam pengelolaan wisata bono di sungai kampar. Oleh sebab itu menurut penulis pengaktifan inovasi/pengembangan sangat penting di teliti.

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Mengenai Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wisata Bono



Sumber : Modifikasi Penulis 2019

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan Konsep sebagai berikut:

- a. Inovasi yang dimaksud adalah berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang oleh sesuatu yang baru.
- b. Pengertian Pemerintah adalah kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara dan yang menjalankan pemerintah.

- c. Pemerintah daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota dan perangkat daerah.
- d. Pariwisata adalah diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ketempat lain. Dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan.
- e. Layanan terintegrasi, dimana sektor publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan. Kewenangan publik seringkali menginterasikan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka.
- f. Desentralisasi pemberian layanan dan monitoring layanan, akan membawa layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis. Desentralisasi layanan mendorong pengembangan ekonomi baru. Desentralisasi layanan meningkatkan partisipasi warga dan meningkatkan kepercayaan dalam pemerintahan.
- g. Pemanfaatan kerjasama, bermakna sebagai pemerintah yang inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga terjadi kerjasama antar publik dan swasta.

- h. Pelibatan warga negara, kewenangan pemerintah yang inovatif harus merealisasikan peran pentingnya dengan mendorong peran warga untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan. Ketika pemerintah menyediakan forum bagi publik untuk mengepresikan pandangannya dan terlibat didalam seluruh langkah-langkah proses, maka hasil inovasi lebih memiliki kemungkinan untuk sukses dan lebih luas jangkauannya. Pendekatan partisipasi memungkinkan warga mengungkapkan kebutuhan dan opini nya terhadap proposal teknis dan memfasilitasi penerapan proyek yang diberikan dan memastikan kesuksesan yang berkelanjutan dari sebuah inovasi perubahan.
- i. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. *United nation world publik sector Report* tahun 2004 mencatat penggunaan layanan berbasis internet untuk memotong red tape dengan cepat keseluruh sektor publik. Kontribusi internet untuk menyederhanakan dan memperbaiki cara warga negara memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan entitas publik.

E. Operasionalisasi Variabel

Adapun Operasionalisasi variabel dalam penelitian Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Wisata Bono di Sungai Kampar:

Tabel II.2 Operasional Variabel tentang Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Wisata Bono Di Sungai Kampar

Konsep	Variabel	Indikator	Dimensi (subindikator)
1	2	3	4
Layanan terintegrasi dimana sektor publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan warga memiliki harapan yang tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan Sangkala(2013)	Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pariwisata	1. Layanan Terintegrasi	a. Inovasi yang ditawarkan b. Sistem Kerja Inovasi
		2. Desntralisasi Layanan	a. Partisipasi Masyarakat
		b. Pemanfaatan Kerjasama	a. Kepastian Kerjasama
		c. Pelibatan Warga Negara	a. Melibatkan masyarakat dalam inovasi
		d. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi	a. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif, merupakan penelitian deskriptif yang bersifat menjelaskan, menggambarkan atau menuturkan dan menafsirkan data objek penelitian. Metode deskriptif yang diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan metode penelitian kualitatif di definisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan atau tulisan).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di Desa Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, sedangkan yang menjadi objek informasi penelitian yaitu Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga yang beralamat di jalan Swa Praja, Komplek Perkantoran Pemda Bhakti Praja Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas latar belakang masalah penelitian yang ditemukan penulis karena kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai.

C. Key Informan dan Informan

Menurut Moleong (2005 : 3) key Informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan sedangkan menurut Moleong (2005:90), informan adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang latar penelitian dan bersedia untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

No	Informan	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1.	Andi Yuliandri,S.Kom	Kepala Dinas	Strata Satu (S1)	Key Informan
2.	R.Eka Putra,S.Sos	Sekretaris Kecamatan	Stara Satu (S1)	Informan
3.	Muhammad Yusuf	Tokoh Masyarakat	Terlampir	Informan
4.	Herman	Masyarakat	Terlampir	Informan

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Sedangkan teknik Penarikan Informan yang peneliti gunakan adalah Teknik Snowball Sampling.

Snowball Sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Dalam penelitian ini data diperoleh dari jawaban responden yang ada di objek wisata Bono terhadap wawancara pengisian kuesioner yang disampaikan langsung oleh si peneliti.

2. Data skunder

Yaitu data yang di peroleh melalui sumber data berupa buku literatur dan laporan penelitian sebelumnya seperti jurnal, buku, majalah dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data tersebut di peroleh dari dinas pariwisata kabupaten pelalawan, jurnal kepariwisataan dan literatur lain yang membahas mengenai materi penelitian berupa peta, data jumlah pengunjung, data organisasi atau pemerintah dan data pendukung lainnya yang di anggap dapat mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Banya teknik yang dapat di gunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk mengungkapkan variabel yang akan di teliti. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah :

1. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pengelola wisata bahari. Adapun yang ditanyakan dalam wawancara ini guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini

F. Teknik Analisis Data

Bedasarkan analisis data dalam penelitian menggunakan teknik kualitatif yaitu data informasi yang berbentuk kalimat variabel dan data kualitatif dapat diperoleh melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan dapat diperoleh secara langsung (lapangan) yang akan dikumpulkan sesuai dengan indikator penelitian serta diuraikan untuk menarik kesimpulan.

G. Jadwal Waktu Kegiatan

Tabel III.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Inovasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Wisata Bono di Sungai Kampar

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2018-2019																							
		Oktober 2018				November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	penyusunan UP	■																							
2	Revisi UP			■	■																				
3	Seminar UP					■	■	■	■																
4	Revisi kuisisioner									■	■	■	■												
5	Rekomendasi Survey											■	■												
6	Survey Lapangan											■	■												
7	Analisis Data													■	■	■	■								
8	Penyusunan laporan hasil penelitian (skripsi)															■	■	■	■	■	■				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																	■	■	■	■				
10	Ujian Konfresif Skripsi																				■				
11	Revisi Skripsi																				■	■	■	■	
12	Penggandaan Skripsi																							■	

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

1. Keadaan Geografis Kabupaten Pelalawan

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Kabupaten Pelalawan dengan luas 13.924,94 km², dibelah oleh aliran Sungai Kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar yaitu: Pulau Mendol, Pulau Serapung dan Pulau Muda serta pulau-pulau yang tergolong kecil seperti: Pulau Tugau, Pulau Labuh, Pulau Baru Pulau Ketam, dan Pulau Untut.

Struktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit, dataran rendah membentang ke arah timur dengan luas wilayah mencapai 93 % dari total keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi.

1. Di bagian utara Pelalawan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Di bagian Timur Kabupaten Karimun dan Kabupaten Indragiri Hilir
3. Di bagian Selatan Kabupaten Kuantan Singigi dan Pasir Penyau Indragiri Hulu
4. Di bagian Barat Kabupaten Kuantan Singigi Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru

Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran [Kabupaten Kampar](#), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999. Pada awalnya terdiri atas 4 wilayah kecamatan, yakni: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD No.138/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan, yang terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun, setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 kecamatan.

2. Keadaan Penduduk Kota Pelalawan

Masalah penduduk di kota Pelalawan sama halnya seperti daerah lain di Indonesia, untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang terkendali akan sulit dicapai.

Berikut merupakan diatribusi data mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan, untuk lebih jelas nya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk dan Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Langgam	15.370	14.427	29.797	107
2	Pangkalan Kerinci	56.843	54.542	111.385	104
3	Bandar Sei Kijang	16.506	15.402	31.908	107
4	Pangkalan Kuras	29.595	28.175	57.770	105
5	Ukui	20.320	18.444	38.764	110
6	Pangkalan Lesung	16.109	15.038	31.147	107
7	Bunut	7.596	7.475	15.071	102
8	Pelalawan	10.043	9.171	19.214	110
9	Bandar Petalangan	7.068	7.038	14.106	100
10	Kuala Kampar	9.182	8.837	18.019	104
11	Kerumutan	11.880	11.407	23.287	104
12	Teluk Meranti	8.506	8.280	16.786	103

	Jumlah	209.018	198.236	407.254	105
--	---------------	---------	---------	---------	-----

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2017

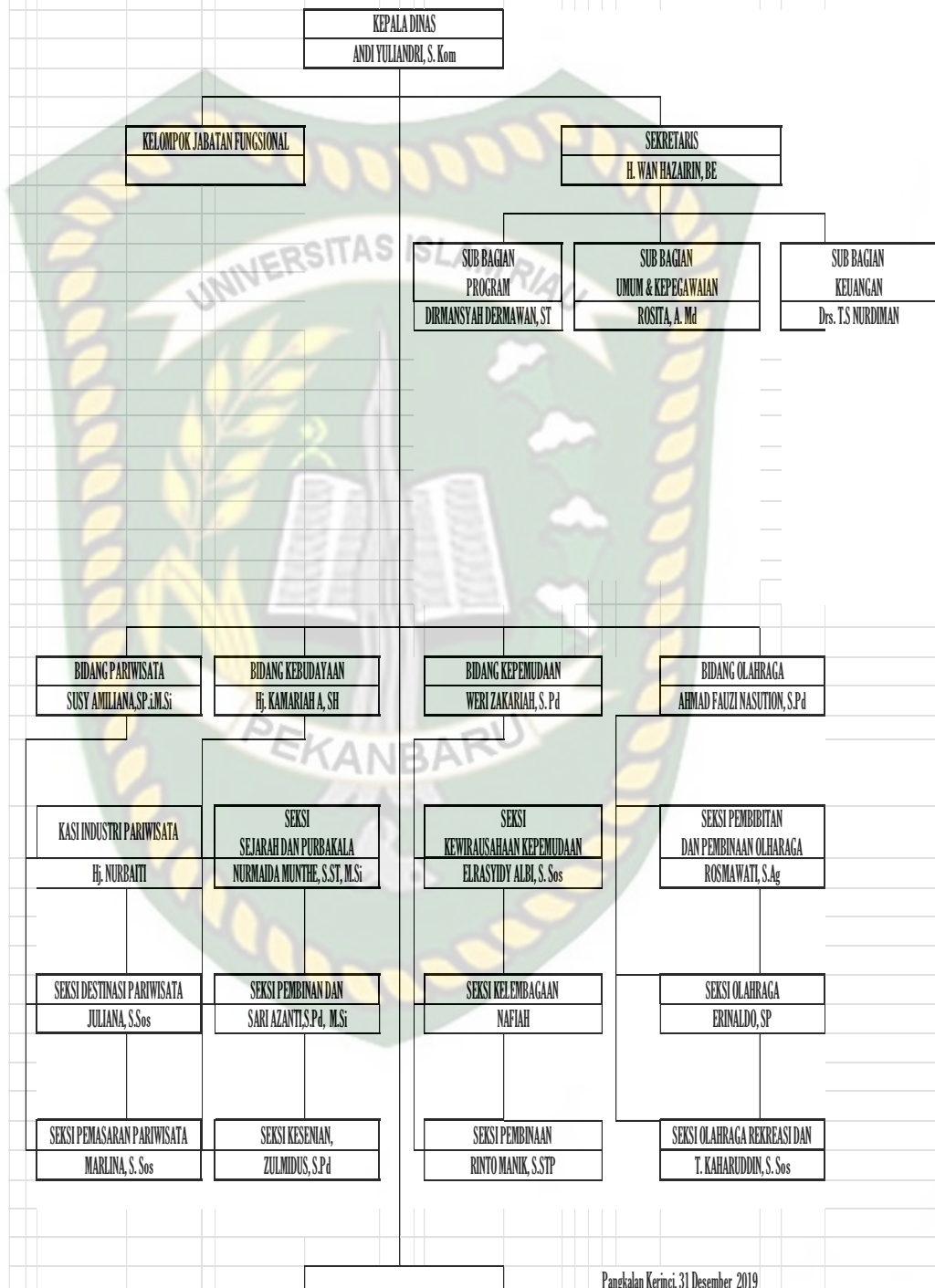
B. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Pelalawan terdiri dari:

Gambar IV.I Struktur Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga





Pangkalan Kerinci, 31 Desember 2019
 KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN
 KEMUDAAN DAN OLARAGA
 KABUPATEN PELALAWAN

ANDI YULIANDRI, S. Kom
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680712 199803 1 008

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga

Tugas Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, adalah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi dan juga pembantuan dibidang Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga.

Untuk melaksanakn tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
3. Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Penyusunan perencanaan bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
5. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi tersebut dijabarkan menjadi fungsi setiap bagian sebagai berikut :

- i. Kepala Dinas**

Kepala Dinas selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan dinas sesuai dengan kewenangannya.

- ii. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja, koordinasi, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan tugas dinas. Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengwasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Program
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan

iii. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan bidang kebudayaan.

iv. Bidang Pariwisata

Bidang pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis promosi dan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata.

v. Bidang Pemuda

Bidang pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan pengembangan, pembinaan, penatan dan pengawasan pemuda.

vi. Bidang Olahraga

Bidang olahraga mempunyai tugas merencanakan melaksanakan pekerjaan/kegiatan/pengembangan serta pengawasan terhadap olahraga.

vii. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri darisejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok tenaga fungsional yang sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional tersebut dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

D. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Visi

Berdasarkan analisa terhadap pernyataan politik Bupati dan Wakil Bupati semasa kampanye pilkada, kemudian kondisi umum dan masalah pembangunan serta isu-isu strategis Kabupaten Pelalawan saat ini yang menjadi tantangan lima tahunan kedepan, dengan memperhitungkan sumberdaya sebagai modal dasar yang dimiliki. Maka Visi pembangunan RPJMD Kabupaten Tahun 2011-2016:PEMBAHARUAN MENUJU KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN PELALAWAN.

Untuk itu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga telah menetapkan Visi yang selaras dengan keadaan lingkungan serta perubahan-perubahan yang ada, dan selaras dengan Visi induk organisasinya. Kabutuhan akan Visi yang berorientasi jauh kedepan menjadi hal yang mutlak untuk mencapai hasil yang akan diraih organisasi.

Visi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011-2016, adalah :TERWUJUDNYA KABUPATEN PELALAWAN SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA UNGGULAN, DIDUKUNG KETAHANAN BUDAYA YANG BERBASISKAN MASYARAKAT MENUJU KEHIDUPAN SEJAHTERA, MANDIRI, SEHAT JESMANI DAN ROHANI.

Pernyataan Visi diatas memuat kata kunci sebagai berikut :

1. Daerah Tujuan Wisata Unggulan

Yaitu upaya menjadikan potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Pelalawan, terutama obyek wisata Alam Gelombang Bono dan Obyek Wisata Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) sebagai icon pariwisata unggulan bukan hanya tingkat kabupaten, namun di tingkat provinsi bahkan nasional yang didukung oleh keragaman dan keunikan budaya serta obyek wisata lainnya yang ada di Kabupaten Pelalawan.

2. Ketahanan Budaya

Yaitu mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, sebagai perisai memperkuat jati diri dan marwah diri yang dapat menerima proses pembaharuan akibat dampak proses globalisasi tanpa melupakan kearifan lokal.

3. Berbasis Masyarakat

Yaitu pembangunan Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi sesuai dengan bidang dan kemampuannya serta bermuara pada peningkatan taraf hidup.

4. Kehidupan Sejahtera

Yaitu peningkatan taraf hidup disegala bidang sebagai dampak dan tujuan dari penyelenggaraan pembangunan disektor Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, yang telah diselenggarakan.

5. Mandiri

Yaitu pembangunan yang diselenggarakan pemerintah akan menciptakan dan menghasilkan masyarakat yang mandiri yang akan

menjadi mitra pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

6. Sehat Jesmani dan Rohani

Yaitu terciptanya masyarakat yang berprestasi yang ditandai dengan tumbuhnya organisasi-organisasi pemuda yang berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan, keolahragaan yang didukung oleh perilaku mental yang terpuji serta melaksanakan perintah agama yang bermuara pada lingkungan yang aman dan tentram.

Misi

Dalam usaha tercapainya visi tersebut diatas, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan mempunyai Misi sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Profesionalisme Sumberdaya Aparatur
- b. Mengoptimalkan dan Meningkatkan Seluruh Potensi Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- c. Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab dan Meningkatkan Peran serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata.
- d. Mengembangkan Potensi dan Kreatifitas pemuda dalam Rangka Menciptakan Masyarakat Kabupaten Pelalawan yang Terampil dan Bedraya Saing Tinggi.
- e. Meningkatkan Peran, Fungsi dan Partisipasi Pemuda Dalam Mewujudkan Iklim yang Kondusif Bagi Pembangunan daerah.

- f. Mewujudkan Sistem Manajemen Keolahragaan Dalam Upaya Menata Sistem Pembinaan Pembangunan Keolahragaan secara Terpadu dan Berkelanjutan.
- g. Meningkatkan Budaya dan Prestasi Olahraga Berjenjang dan Berkelanjutan Melalui Tahap Pengenalan Olahraga, Pemantauan, Pemanduan dan Pengembangan Bakat Serta Peningkatan Prestasi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Identitas Informan

Dalam melakukan sebuah penelitian sangat penting dijelaskan mengenai identitas informan penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah hasilnya dapat di pertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pasti telah sesuai dengan subansi penelitian.

Dalam penelitian tentang Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Wisata Bono di Sungai Kampar ini penulis akan menjelaskan mengenai identitas informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia informan.

1. Tingkat Pendidikan

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Magister (S2)	5
2	Strata Satu (S1)	16
3	Diploma	4
4	SLTA	4
5	SLTP	2
	Jumlah	31

Sumber : Data Olahan Penelitian Lapangan 2019

Dalam tabel diatas diketahui bahwa sumber daya manusia ditingkat pendidikan dalam penelitian ini bervariasi, mulai dari Magister (S2) berjumlah 5 orang, Strata Satu (S1) berjumlah 16, Diploma berjumlah 4 orang, SLTA berjumlah 4 orang, SLTP berjumlah 2 orang, jadi jumlah keseluruhan sumber

daya manusia di tingkat pendidikan dalam penelitian ini berjumlah 31 orang, dan dapat disimpulkan bahwa yang mendominasi dalam penelitian ini yaitu pada pendidikan Strata Satu (S1) yang berjumlah 16 orang.

2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat kaitannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan cenderung semakin berperan pengalamannya dalam menentukan keputusan untuk bertindak dibandingkan dengan umur yang lebih muda.

Dalam penelitian ini keberagaman usia informan, mulai dari yang termuda yaitu tahun sampai tahun. Adapun usia informan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah
1	20-30	8
2	31-40	15
3	41-50	6
4	51-59	2
	Jumlah	31

Sumber : Data Olahan Penelitian Lapangan 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berumur 20-30 tahun adalah sebanyak 8 orang, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 15, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 6 orang, yang berumur 51-59 tahun sebanyak 2 orang. Jadi dari gambaran diatas dapat diketahui bahwa rata-rata responden dalam penelitian

ini relative sudah dewasa yaitu dari 31 orang yang dijadikan responden sebanyak 15 orang sudah berumur 31-40 tahun.

3. Jenis Kelamin Informan

Jenis kelamin dalam sebuah penelitian tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruh jenis kelamin informan pada hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah. Adapun jenis kelamin informan adalah sebagai berikut :

Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	19
2	Perempuan	12
	Jumlah	31

Sumber : Data Olahan Penelitian Lapangan 2019

berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah informan laki-laki lebih banyak yaitu 19 orang sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 12 orang.

Sehingga jika dilihat identitas informan yang telah penulis jabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa informan yang digunakan dalam penelitian ini cukup berkompeten untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menjawab masalah penelitian ini.

D. Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Wisata Bono

Pada dasarnya Inovasi suatu proses atau hasil pengembangan pemanfaatan suatu sumber daya yang telah ada sebelumnya sehingga memiliki nilai yang lebih, terlebih lagi dalam pengembangan objek wisata bono maka dibutuhkannya inovasi yang sangat baik untuk dapat terciptanya wisata yang banyak di minati para wisatawan khususnya dalam maupun luar daerah.

Adapun indikator-indikator dalam Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Wisata Bono di Sungai Kampar :

1. Layanan Terintegrasi

Sistem manajemen terpadu adalah sistem manajemen yang mengintegrasikan semua sistem dan proses organisasi dalam satu kerangka lengkap, yang memungkinkan organisasi untuk bekerja sebagai satu kesatuan dengan tujuan terpadu/terintegrasi

- a. Inovasi apa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan objek wisata bono ?

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Andi yulianti, S.Kom selaku Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 09.00 WIB.

Beliau mengatakan “Inovasi untuk menaikkan citra pariwisata bono, itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, dan sudah dijalankan oleh dinas pariwisata, tinggal menunggu hasilnya. Kalau dilihat-lihat saat ini wisata bono juga sudah mulai berkembang dan banyak di minati wisatawan. Dan itulah target kami kalau bisa setiap tahun kami selalu berupaya supaya wisata bono itu lebih di kenal oleh wisatawan”

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Andi Yuliandi S.Kom selaku Kepala Dinas Disparora maka dapat dianalisis pemerintah daerah sudah membuat inovasi dalam menaikkan citra pariwisata bono, dan dinas pariwisata sudah menjalankan inovasi tersebut, tinggal menunggu hasilnya, tetapi kalau melihat dari tahun ke tahun pariwisata bono ini sudah berkembang dan akan terus di tingkatkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Raja Eka Putra S. Sos selaku Sekretaris camat (Sekcam) pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 10.00 WIB.

Beliau mengatakan “ada inovasi pengembangan wisata bono, inovasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sudah bagus tetapi masih banyak kendala yang terjadi dalam pengembangan objek wisata ini, ya salah satunya mungkin di dana ya, kita kan tidak tau, tetapi kita berharap inovasi dari pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik”

Berikut kutipan dari wawancara peneliti bersama Bapak Raja Eka Putra S.Sos selaku Sekretaris Camat maka dapat dianalisis bahwa inovasi pengembangan wisata bono sudah ada, tetapi masihi banyak kendala-kendala dalam menjalankan inovasi tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 13.10 WIB.

Beliau mengatakan “saya tidak tau apa inovasi dari pemerintah daerah, kami hanya ingin yang terbaik saja untuk wisata bono ini, karena kami hanya menjaga dan melestarikan wisata kita ini”

Berdasarka kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh masyarakat, maka dapat di analisis bahwa bapak Muhammad

Yunus selaku tokoh masyarakat mengatakan beliau tidak mengetahui apa inovasi dari pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata bono, dan beliau berharap yang terbaik untuk wisata bono ini.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Herman selaku Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 15.10 WIB.

Beliau mengatakan “kurang tau dek, kalau yang saya tau mungkin peningkatan sarana dan prasarana saja.”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Herman selaku masyarakat, maka dapat di analisis bahwa bapak Herman mengatakan beliau tidak mengetahui inovasi yang di berikan oleh pemerintah daerah. Maka kurangnya pengetahuan bagi masyarakat tentang inovasi pengembangan pariwisata.

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan pemerintah daerah sudah membuat inovasi untuk pengembangan pariwisata melalui tuju program. Salah satu dari 7 program itu adalah Pengembangan Objek Wisata Bono. Dan sudah dijalankan oleh dinas pariwisata. Kecamatan juga mengetahui inovasi dari pemerintah daerah, hanya saja pandangan kecamatan masih banyak kendala-kendalan dalam pengembangan inovasi tersebut. Dan untuk tokoh masyarakat dan masyarakat kurang mengetahui inovasi dalam pengembangan objek wisata.

b. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah dengan Inovasi pemerintah bisa mewujudkan layanan yang terintegrasi ?

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Andi yulianti, S.Kom selaku Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 09.10 WIB.

Beliau mengatakan “Sangat bisa, karena dengan adanya inovasi itu sendiri bisa menciptakan layanan yang saling terhubung, saya kasih contoh satu, seperti dalam pengembangan sarana dan prasarana, apa yg sudah tidak layak akan di proses dengan cepat”.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Andi Yuliandi S.Kom selaku Kepala Dinas Disapora maka dapat di simpulkan bahwa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata bono berupa mengembangkan aksesibilitas seperti jalan, amenities kenyamanan wisatawan, dan promosi. Ada juga dalam pengembangan ekonomi kreatif seperti cendra mata dan wisata kuliner.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Raja Eka Putra S. Sos selaku Sekretaris Camat (Sekcam) pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 10.10 WIB.

Beliau mengatakan “bisa dek, itu kan jadi pedoman untuk menghasilkan hal baru untuk wisata ini, layanan terintegritasi paling perlu dan inti dalam pengembangan wisata bono”

Berikut kutipan dari wawancara peneliti bersama Bapak Raja Eka Putra S.Sos selaku Sekretaris Camat bahwa inovasi pemerintah dapat menciptakan layanan yang saling terhubung, dan layanan integritasi ini adalah inti dari pengembangan objek wisata bono.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 13.18 WIB.

Beliau mengatakan “kalau bisa berjalan karena kalau bisa saling terhubung begitu kan lebih mudah dalam pengurusan, dan pariwisata bono ini bisa lebih cepat berkembang”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh masyarakat maka dapat di analisis bahwa beliau mengharapkan layanan terintegrasi ini berjalan dengan baik, karena akan lebih mudah dalam pengurusan, dan pariwisata bono ini bisa lebih cepat berkembang .

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Herman selaku Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 15.10 WIB.

Beliau mengatakan “menurut saya bisa, karena kami masyarakat juga perlu tau apa saja informasi dan tujuan yang baru sehingga kami tidak ketinggalan informasi”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Herman selaku masyarakat, maka dapat di analisis bahwa bapak Herman juga ingin layanan terintegrasi bisa terwujud supaya masyarakat tidak ketinggalan informasi.

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa semua aspek menginginkan dapat terwujudnya layanan terintegrasi sehingga pemerintah dan masyarakat serta yang lainnya dapat bekerja sebagai satu kesatuan dan tujuan yang terpadu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk indikator Layanan Terintegrasi dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah sudah membuat inovasi untuk pengembangan pariwisata melalui tujuh program. Salah satu dari tujuh program itu Pengembangan Objek Wisata Bono. Dan sudah dijalankan oleh dinas pariwisata. Kecamatan juga mengetahui inovasi dari pemerintah daerah, hanya saja pandangan kecamatan masih banyak kendala-kendalan dalam pengembangan inovasi tersebut. Sedangkan hasil dari observasi dilapangan tokoh masyarakat dan masyarakat kurang mengetahui inovasi dalam pengembangan objek wisata bono

dan kurangnya layanan informasi ke masyarakat. Maka dapat disimpulkan indikator Layanan Terintegrasi dapat dikatakan kurang terlaksana

2. Desentralisasi Layanan dan Monitoring Layanan

Dengan desentralisasi, diharapkan ‘jarak’ antara masyarakat dengan pembuat kebijakan (pemerintah lokal) menjadi lebih dekat dan erat baik secara politik maupun geografis, sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Hubungan erat dan dekat antara pemerintah lokal dan masyarakatnya memungkinkan pemerintah lokal memperoleh informasi terbaru dan informasi yang sesuai tentang permasalahan dan preferensi masyarakatnya sehingga pemerintah lokal akan lebih memahami kebutuhan dan permasalahan lokal serta pemerintah lokal akan memiliki posisi yang lebih baik untuk menetapkan prioritas-prioritas kebijakan yang benar dan fleksibel dibandingkan pemerintah pusat atau regional (Peabody et. al., 1999 ; Khaleghian, 2003).

- a. Apakah dengan Inovasi pemerintah sudah memberikan peluang monitoring (Pengawasan) kepada pihak pariwisata dan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Andi Yuliandi, S.Kom selaku Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 09.19 WIB

Beliau mengatakan “ya sudah, kami sudah sepenuhnya mengawasi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke pariwisata bono, khususnya sarana dan prasarana kami selalu berupaya meningkatkan, seperti tahun ini planning kami akan ada tambahan sarana seperti speedboot, banan boot, bola air yang kita masuk dalam bola dan diputar-putar, ya itu mudah-mudahan akan ada di tahun ini”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa pemerintah sudah memberikan peluang monitoring kepada pihak pariwisata dan warga dalam pelayanan yang diberikan. Pariwisata juga berencana akan menambah fasilitas sarana seperti banana boat, speed boat dan bola air.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Raja Eka Putra S. Sos selaku Sekretaris Camat (Sekcam) pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 10.22 WIB.

Beliau mengatakan “pastinya kami dari kecamatan selalu memonitoring atau selalu mengawasi dan selalu bekerja sama dengan dinas pariwisata dan pemerintah daerah dalam pengawasan wisata ini”

Berikut kutipan dari wawancara peneliti bersama Bapak Raja Eka Putra S.Sos selaku Sekretaris Camat dapat di analisis bahwa kecamatan selalu memonitoring atau selalu mengawasi dan selalu bekerja sama dengan pihak pariwisata dan pemerintah daerah dalam pengawasan wisata bono.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 13.24 WIB.

Beliau mengatakan “saya diminta oleh pemerintah tidak ada, inisiatif saya sendiri untuk menjaga dan merawat wisata ini beserta sarana dan prasarannya, karena ini kan wilayah kita dan kita juga mencari rezeki dari sini juga, pastinya kami selalu menjagannya”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh masyarakat maka dapat di analisis bahwa pemerintah daerah tidak ada kontak ke warga untuk memberi tahukan bahwa masyarakat ikut serta dalam pengawasan pariwisata bono ini. Masyarakat inisiatif sendiri menjaga dan

merawat wisata bono itu. Disamping karena mereka bertempat tinggal di sana, juga mereka mencari rezeki dari sungai bono itu sendiri.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Herman selaku Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 15.21 WIB.

Beliau mengatakan “saya rasa ada himbauan pemerintah untuk menjaga dan mengawasi sarana dan prasara serta menjaga semua fasilitas yang ada di sini”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Herman selaku masyarakat, maka dapat di analisis bahwa masyarakat setempat mengetahui himbauan dari pemerintah daerah untuk ikut serta memberikan pengawasan kepada masyarakat agar menjaga dan merawat fasilitas sarana dan saran yang ada di wisata bono.

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan pemerintah daerah memberikan peluang monitoring(pengawasan) kepada pihak pariwisata dan masyarakat terhadap sarana dan prasara yang diberikan. Tetapi untuk himbauan langsung dari pemerintah daerah secara langsung kepada masyarakat itu belum terlaksana dengan baik, karena masih ada beberapa warga yang belum mengetahui pemberitahuan pengawasan kepada wisata tersebut.

- b. Apakah dengan Inovasi pemerintah bisa memberikan kepastian sarana dan prasara yang layak untuk wisata bono ?

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Andi yuliandi, S.Kom selaku Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 09.25 WIB.

Beliau mengatakan “Sangat bisa. Karena kalau pemerintah daerah serius dalam menanggapi inovasi pengembangan wisata bono mungkin bisa sangat cepat di proses dan sarana dan prasarana pasti akan sangat bagus dan tentunya akan sangat layak untuk di gunakan atau di nikmati”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa kalau pemerintah daerah serius dalam menanggapi inovasi pengembangan wisata bono, maka akan sangat cepat di proses sarana dan prasarana yang layak dan tentunya sangat bagus dan baik untuk di nikmati atau digunakan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Raja Eka Putra S. Sos selaku Sekretaris Camat (Sekcam) pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 10.28 WIB.

Beliau mengatakan “iya kalau inovasinya benar-benar di jalankan dengan baik, mungkin tidak ada yang tidak bisa, sebentar mungkin langsung siap dan bagus wisata bono ini.”

Berikut kutipan dari wawancara peneliti bersama Bapak Raja Eka Putra S.Sos selaku Sekretaris Camat dapat di analisis bahwa kalau pemerintah daerah serius dalam menjalankan inovasi pengembangan wisata bono mungkin tidak memerlukan waktu lama, maka wisata bono ini akan bagus.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 13.28 WIB.

Beliau mengatakan “ya harapan kami mudah-mudahan inovasinya bisa berjalan dan sarana dan prasarana wisata ini bisa sangat bagus dan ramai dikunjungi oleh wisata yang datang”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh masyarakat maka dapat di analisis bahwa beliau berharap inovasi pemerintah berjalan dengan dengan baik sehingga sarana dan prasarana

wisata bono bisa sangat baik dan bagus sehingga wisatawan yang datang semakin ramai atau banyak.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Herman selaku Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 15.29WIB.

Beliau mengatakan “ya mudah-mudahan bisa dek, kami masyarakat hanya bisa menjaga dan merawat saja”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Herman selaku masyarakat, maka dapat di analisis bahwa masyarakat berharap pemerintah dapat memenuhi sarana dan prasara sehingga masyarakat dapat menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut.

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan dinas pariwisata sangat yakin pemerintah daerah akan memberikan kepastian sarana dan prasarana yang layak untuk wisata bono, begitu juga kecamatan. Tetapi ketika dilapangan kami melihat akses menuju ke wisata bono masih terbilang kurang memadai begitu juga dengan fasilitas toilet umum yang masih kurang. Sedangkan masyarakat hanya berharap agar sarana dan prasarana bisa sangat baik dan layak di gunakan sehingga dapat menarik wisatawan yang banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk indikator Desentralisasi Layanan dan Monitoring Layanan dapat disimpulkan bahwa indikator Desentralisasi Layanan dan Monitoring Layanan dikatakan kurang terlaksana. Dapat dilihat dari pemerintah daerah menjanjikan sarana dan prasarana yang layak bagi wisata bono melalau inovasi pengembangan wisata bono. Namun hasil observasi kelapangan, kondisi sarana dan prasarana masih sangat kurang. Dan bentuk kerja sama pemerintah daerah dengan masyarakat, pemerintah mengatakan

sudah melakukan pembinaan dan fasilitas, namun hasil observasi dilapangan , masyarakat masih belum menerima fasilitas yang baik dan harapan masyarakat pemerintah dapat merenovasi fasilitas yang sudah bisa diganti atau diperbaharui..

3. Pemanfaatan Kerjasama

Pengertian kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama bisa terjadi ketika individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama.

- a. Pihak mana saja yang bekerjasama dalam pengembangan semua aspek wisata bono?

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Andi yuliandi, S.Kom selaku Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 10.30 WIB.

Beliau mengatakan “semua pihak yang ikut serta dalam pengembangan wisata. Pertama pemerintah daerah, kedua dinas kepariwisataan beserta jennangnya, ketiga masyarakat, ada juga yang namanya industri pariwisata,. Semua bekerjasama dalam meningkatkan wisata bono”

Berdasarka kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa pemerintah daerah, dinas pariwisata,ada juga industri pariwisata, dan masyarakat ikut serta bekerjasama dalam pengembangan objek wisata bono.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Raja Eka Putra S. Sos selaku Sekretaris camat (Sekcam) pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 10.35WIB.

Beliau mengatakan “yang ikut serta dalam pengembangan wisata bono, Pihak pemerintah daerah, dinas pariwisata, warga mereka saling bekerjasama dalam pengembangan wisata bono”

Berikut kutipan dari wawancara peneliti bersama Bapak Raja Eka Putra S.Sos selaku Sekretaris Camat dapat di analisis bahwa pemerintah daerah, dinas pariwisata dan masyarakat ikut serta dalam pengembangan pariwisata bono .

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 13.35 WIB.

Beliau mengatakan “pemerintah, dinas pariwisata, pemuda pemudi daerah, tokoh masyarakat seperti kami ini, masyarakat, dan kalau bisa di bentuk satu ikatan pemuda pemudi yang bertujuan untuk memberitahukan bahwa objek ombak bono ini sebenarnya bahaya dan mereka mengarahkan para wisatawan agar lebih mengenal objek ombak wisata bono tersebut”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh masyarakat maka dapat di analisis bahwa bapak Muhammad Yusuf mengetahui pihak mana saja yang ikut serta dalam pengembangan wisata bono. Dan beliau berharap dibentuk satu kelompok pemuda-pemudi daerah yang bertujuan memberitahukan bahwa objek ombak wisata bono ini sangat bahaya sehingga wisatawan bisa lebih berhati-hati dalam menikmati objek ombak wisata bono tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Herman selaku Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 15.35 WIB.

Beliau mengatakan “setahu saya pemerintah, dinas pariwisata dan, masyarakat, itu umumnya saja, yang lainnya saya kurang tau dek”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Herman selaku masyarakat, maka dapat di analisis bahwa masyarakat hanya mengetahui

kerjasama umum dari pemerintah, dinas pariwisata dan masyarakat, seperti dari pihak yang lin masyarakat kurang mengetahuinya.

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan bahwa Cuma masyarakat saja yang masih awam dalam mengetahui pihak apa saja yang bekerjasama dalam pengembangan wisata bono.

- b. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam proses kerjasama dalam pengembangan wisata bono ?

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Andi yuliandi, S.Kom selaku Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 10.37 WIB.

Beliau mengatakan “banyak sih. pertama rendahnya mutu dari pelayanan dari para penyelenggara, kedua rendahnya kesadaran masyarakat tetntang pentingnya pengembangan pariwisata itu merupakan kendala, sebab banyak pengembangan yang gagal akibat rendahnya kesadaran tersebut. ketiga Kurangnya modal dan sumberdaya manusia. keempat kurangnya sarana dan prasarana, dan kelima sistem transportasi yang belum memadai seringkali menjadi kendala.”

Berdasarka kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa banyak kendala yang bisa terjadi dalam proses kerjasama dalam pengembangan wisata bono, pertama rendahnya mutu dari pelayabab dari para penyelenggara, kedua rendahnya kesadaran masyarakat tetntang pentingnya pengembangan pariwisata karena banyak pengembangan yang gagal karena rendahnya kesadaran dari pihak masyarakat, ketiga kurangnya dana dan sumberdaya manusia, keempat kurangnya sarana dan prasarana, dan kelima sistem transportasi yang belum memadai.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Raja Eka Putra S. Sos selaku Sekretaris camat (Sekcam) pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 10.42WIB.

Beliau mengatakan “kendala pasti ada. Kita ambil satu contoh kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata merupakan kendala sosial yang masih banyak dijumpai di masyarakat yang bergerak di sektor itu sendiri. Contohnya di wisata bono ini kan banyak turis-turis yang datang, mereka beranggapan turis itu adalah orang kaya sehingga ada hal-hal aneh yang keluar dan kedengaran sumbang seperti : om minta duit dong. Itu saja bisa menjadi kendala yang sangat besar sehingga turis itu enggan untuk kemari lagi”

Berikut kutipan dari wawancara peneliti bersama Bapak Raja Eka Putra S.Sos selaku Sekretaris Camat dapat di analisis bahwa kendala pasti ada, beliau memberikan satu contoh kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata merupakan kendala sosial yang masih banyak dijumpai dimasyarakat yang bergerak di sektor itu sendiri. Contohnya di wisata bono ini banyak turis-turis yang datang. Masyarakat beranggapan turis itu adalah orang kaya sehingga ada hal-hal aneh yang keluar dan kedengaran sumbang seperti : om minta duit dong. Itu saja sudah menjadi kendala besar sehingga para turis enggan untuk kembali lagi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 13.42 WIB.

Beliau mengatakan “aspirasi kami kurang didengar, kami sudah menjaga dan merawat wisata ini, tetapi akses jalan dan sarana prasarana masih kurang di perbaharui, seperti toilet umum, aturannya pemerintah bisa memperhatikan, banyak kendala yang harus dilihat lagi, ya kami berharap semoga pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi, itu saja”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh masyarakat maka dapat di analisis bahwa beliau mengatakan aspirasi mereka kurang di dengar padahal mereka sudah merawat dan menjaga wisata tersebut, serta akses jalan dan sarana prasarana yang masih kurang memadai, beliau berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi semua aspek tujuan dan sarana prasarana yang ada di wisata bono.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Herman selaku Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 15.42 WIB.

Beliau mengatakan “ada dek, banyak salah satunya akses ke wisata bono ini, bisa dilihat akses kesini jauh terus jalannya yang rusak, belum lagi kalau hujan itu sangat payah untuk dilewati, ya mudah-mudahan pemerintah cepat menanggapi akses tersebut”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Herman selaku masyarakat, maka dapat di analisis bahwa salah satu kendala yang dihadapi seperti akses jalan menuju wisata bono yang sangat jauh dan masih payah, sebagian jalan masih belum diaspal dan masih payah di lalui, apalagi disaat hujan turun maka jalan akan semakin payah untuk dapat di akses.

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan bahwa pihak yang terkait kerjasama masing-masing memiliki problem yang berbeda-beda sehingga kurang berjalannya aspek-aspek pengembangan wisata bono .

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk indikator Pemanfaatan Kerjasama dapat disimpulkan bahwa indikator Pemanfaatan Kerjasama dapat dikatakan kurang terlaksana. dinas pariwisata dan kecamatan mengatakan kendala yang dihadapi terjadi karena masyarakat masih kurangnya kesadaran akan pengembangan wisata tersebut. Namun hasil dari observasi dilapangan

masyarakat mengatakan yang menjadi kendala dalam kerjasama pengembangan wisata bono karena pemerintah masih kurang memperhatikan akses menuju ke pariwisata dan kurang memperhatikan sarana dan prasarana yang sudah kurang layak di gunakan, dan jarang diperbaharui.

4. Pelibatan Warga Negara

Keterlibatan warga negara dalam memperkuat karakter peduli lingkungan. Keterlibatan warga negara mengacupada cara warga berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat untuk memperbaiki kondisi orang lain atau untuk membantu membentuk masa deppan masyarakat.

- a. Apakah dalam membuat atau merumuskan sebuah kebijakan sudah melibatkan peran masyarakat sebagai warga negara ?

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Andi yulianti, S.Kom selaku Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 10.45 WIB.

Beliau mengatakan “ya pastinya, karena masyarakat masuk dalam lingkup memberi dukungan untuk suatu kebijakan itu sendiri. Masyarakat musti tau dan ikut serta dalam membuat sebuah kebijakan ”

Berdasarka kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa masyarakat pastinya ikut serta dalam membuat atau merumuskan sebuah kebijakan karena masyarakat masuk dalam ruang lingkup serta memberi dukungan untuk suatu kebijakan itu sendiri.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Raja Eka Putra S. Sos selaku Sekretaris camat (Sekcam) pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 10.49WIB.

Beliau mengatakan “pastinya karena masyarakat perlu juga dalam merumuskan kebijakan. Contohnya nanti dari keikutsertaan masyarakat akan muncul nantinya masyarakat yang sadar akan hukum”

Berikut kutipan dari wawancara peneliti bersama Bapak Raja Eka Putra S.Sos selaku Sekretaris Camat dapat di analisis bahwa masyarakat pastinya ikut serta dalam merumuskan kebijakan, beliau juga mengasih contoh kalau masyarakat ikut serta nantinya masyarakat akan menjadi masyarakat yang sadar akan hukum.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 13.49 WIB.

Beliau mengatakan “kami tidak mengetahui itu dek, tetapi dalam membuat kebijakan kami selalu dikasih tau untuk ikut serta dalam pengembangan dan menjaga wisata bono ini”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh masyarakat maka dapat di analisis bahwa beliau mengatakan beliau kurang mengetahui dari peran masyarakat sebagai warga negara dalam membuat atau merumuskan suatu kebijakan, tetapi mereka selalu dikasih tau untuk ikut serta dalam pengembangan dan ikut serta dalam menjaga wisata bono.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Herman selaku Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 15.48WIB.

Beliau mengatakan “wah kurang tau juga dek, kami hanya di kasih tau untuk menjaga selalu wisata ini, di rawat dan selalu di beri arahan agar menjadi masyarakat yang ramah dan baik sehingga wisata yang datang nyaman disini”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Herman selaku masyarakat, maka dapat di analisis bahwa masyarakat kurang mengetahui dari

peran masyarakat sebagai warga negara dalam membuat atau merumuskan suatu kebijakan. Mereka hanya diarahkan agar menjaga dan merawat wisata bono, agar wisatawan yang datang nyaman.

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan bahwa masyarakat masih awam tentang peran masyarakat ikut serta dalam membuat atau merumuskan sebuah kebijakan, masyarakat hanya mengetahui arahan pemerintah agar merawat dan menjaga wisata.

- b. Bagaimana inovasi dari pemerintah daerah untuk melibatkan warga negara supaya turut adil dalam mengawasi wisata bono ?

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Andi yuliandi, S.Kom selaku Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 10.53 WIB.

Beliau mengatakan “inovasi pemerintah mengajak masyarakat ikut menjaga dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dalam mengawasi wisata bono supaya menjadi wisata yang indah dan bersih serta dapat menaikkan citra wisata itu sendiri”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa masyarakat diminta untuk ikut serta menjaga dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dalam mengawasi wisata bono supaya menjadi wisata yang indah dan bersih serta dapat menaikkan citra wisata bono itu sendiri.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 13.54 WIB.

Beliau mengatakan “dengan cara kami sebagai masyarakat selalu menjaga dan merawat wisata itu sendiri, kami sebagai masyarakat sadar akan hal itu, karena itu lah mata pencarian kami, bono ini tempat kami bergantung hidup maka dari itu pasti kami jaga”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh masyarakat maka dapat di analisis bahwa beliau mengatakan dengan cara menjaga dan merawat wisata bono, dan kami sebagai masyarakat sadar akan hal itu karena sungai bono itulah tempat kami bergantung hidup, maka dari itu pasti kami jaga.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Herman selaku Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 15.52WIB.

Beliau mengatakan “ya kami jaga dan kami rawat wisata ini dek. Wisata ini juga bisa menjadi pendapatan kami sebagai masyarakat dengan cara berjualan”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Herman selaku masyarakat, maka dapat di analisis bahwa masyarakat ikut serta dalam merawat dan menjaga wisata bono karena itu bisa menjadi mata pencarian mereka, seperti berjualan..

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan bahwa masyarakat selalu ikut serta dalam mengawasi menjaga atau merawat wisata bono ini dan masyarakat juga bisa menjadi salah satu inovasi pengembangan wisata bono .

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk indikator Pelibatan Warganegara dapat disimpulkan bahwa indikator Pelibatan Kewarganegara dapat dikatakan kurang terlaksana. dinas pariwisata dan kecamatan mengetahui peran masyarakat ikut serta dalam membuat atau merumuskan sebuah kebijakan. Namun hasil dari observasi dilapangan masyarakat mengatakan kurang

mengetahui peran masyarakat dalam membuat atau merumuskan sebuah kebijakan karena kurangnya pengetahuan atau informasi yang diberikan oleh pemerintah.

5. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi adalah pemanfaatan teknologi yang dibutuhkan untuk mengetahui informasi yang sangat cepat ini tentunya memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Berbagai bidang kehidupan manusia kini mulai menerapkan berbagai perangkat berteknologi baru guna memudahkan komunikasi dan pekerjaan.

- a. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan citra wisata bono ?

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Andi yuliandi, S.Kom selaku Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 10.59 WIB.

Beliau mengatakan “dalam pemanfaatan teknologi dengan melakukan promosi di media internet sehingga masyarakat luar mengetahui keindahan wisata bono yang terletak di kecamatan teluk meranti ini. Dan kita bisa juga membuat event-event yang bagus sehingga menjadi penarik bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke wisata bono ini”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa dengan memanfaatkan teknologi dengan melakukan promosi di media sosial sehingga masyarakat luar atau wisatawan dari luar daerah bisa mengetahui keindahan wisata bono ini, dan kita juga bisa membuat event-event yang menarik sehingga wisatawan melihat dan tertarik ingin datang ke wisata bono.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Raja Eka Putra S. Sos selaku Sekretaris camat (Sekcam) pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 10.58WIB.

Beliau mengatakan “dengan adanya teknologi mungkin kita bisa membuat promosi melalui internet itu kan lebih bagus, karena semua masyarakat pastinya sudah menggunakan akses internet, jadi pastinya akan semakin mudah dalam menarik perhatian masyarakat luar daerah untuk datang ke wisata bono ini”

Berikut kutipan dari wawancara peneliti bersama Bapak Raja Eka Putra S.Sos selaku Sekretaris Camat dapat di analisis bahwa dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi kita bisa lebih mudah membuat promosi ke internet sehingga menarik perhatian masyarakat ataupun wisatawan dari luar daerah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 14.02 WIB.

Beliau mengatakan “dengan itu yang nama nya facebook itu atau internet, kan kita bisa memberitahu kepada mereka tentang pariwisata bono ini. Bapak mana ngerti main internet, anak anak sekarang banyak itu yang main internet, katanya dengan internet itu orang yang jauh-jauh bisa tau kalau disini ada wisata bono, ya kalau bisa manfaati lah itu yang namanya internet”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh masyarakat maka dapat di analisis bahwa beliau mengatakan dengan cara menggunakan facebook atau internet, harapan beliau dengan adanya internet bisa dimanfaatkan sebagai lompatan untuk masyarakat luar lebih mengetahui wisata bono ini.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Herman selaku Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 15.58WIB.

Beliau mengatakan “dengan menggunakan internet atau dengan media masa seperti siaran tv, atau acara si bolang undang ke sini pastinya akan menarik perhatian masyarakat luar”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Herman selaku masyarakat, maka dapat di analisis bahwa masyarakat ingin menggunakan media internet atau dengan media televisi, atau dengan cara mengundang acara televisi si bolang ke wisata bono ini sehingga bisa menarik para peminat wisatawan dalam ataupun luar daerah.

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan bahwa masyarakat ingin menggunakan media internet dan televisi untuk mempromosikan wisata bono kedalam maupun luar daerah, dan masyarakat juga menggunakan media televisi seperti acara televisi si bolang untuk menarik perhatian dari wisatawan dalam dan luar daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk indikator Teknologi Komunikasi dan Informasi dapat disimpulkan bahwa indikator Teknologi Komunikasi dan Informasi dapat dikatakan kurang terlaksana. Dinas pariwisata mengatakan banyak cara dalam mempromosikan wisata bono, begitu juga dengan kecamatan dan warga. Namun hasil dari observasi dilapangan media internet masih kurang memposting event-event yang menarik wisatawan, serta postingan yang di internet itu masih postingan lama pada tahun 2017 yang lalu, seharusnya setiap tahun selalu ada pembaharuan supaya masyarakat luar bisa mngetahui perkembangan dari wisata bono tersebut.

b. Apakah ada kendala dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Jika ada kendala apa saja yang dihadapi serta solusinya ?

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Andi yuliandi, S.Kom selaku Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 11.09 WIB.

Beliau mengatakan “kendala ya. Mungkin di biaya, kan membuat postingan atau web sendiri itu kan memerlukan situs web, situs web yang resmi dan tahan lama itu kan berbayar, kalau yang gratisan paling bertahan 1 bulan, solusinya ada dana maka semua bisa berjalan”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa yang menjadi kendala adalah soal biaya, karena situs web yang resmi pasti berbayar biar bisa selalu update atau jangka lama. Sedangkan kalau tidak memakai biaya maka postingan di internet paling lama situsnya hanya bertahan satu bulan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Raja Eka Putra S. Sos selaku Sekretaris camat (Sekcam) pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 11.08WIB.

Beliau mengatakan “apaya,, mungkin koneksi internetnya lama sehingga payah dalam mengakses situs wisata bono kita, solusinya dengan cara memakai koneksi yang kencang seperti telkomsel. Oh iya bagian situs webnya biasanya yg asli itu berbayar kalau mau buat situs web sendiri, kalau yg gratisan itu ada limitnya, solusinya biaya yg harus dikeluarkan untuk situs web tersebut”

Berikut kutipan dari wawancara peneliti bersama Bapak Raja Eka Putra S.Sos selaku Sekretaris Camat dapat di analisis bahwa pertama koneksi internet yang lama dapat menjadi kendalan, solusinya harus menggunakan koneksi yang kencang seperti telkomsel dan lainnya. Yang kedua untuk membuat situs resmi diperlukan biaya, sedangkan kalau memakai situs web yang biasa itu ada batas limit waktunya, solusinya dengan mengeluarkan biaya untuk membeli situs web.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 14.09 WIB.

Beliau mengatakan "saya kurang mengerti internet dek, saya hanya berharap yang terbaik saja untuk wisata kita ini, semoga semakin berkembang dan banyak diminati masyarakat luar"

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Muhammad Yusuf selaku Tokoh masyarakat maka dapat di analisis bahwa beliau tidak bisa mengerti menggunakan media internet dikarenakan bapak Muhammad Yusuf sudah agak berumur. Beliau berharap yang terbaik bagi wisata Bono semoga wisata Bono bisa dikenal masyarakat dalam maupun masyarakat luar daerah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Herman selaku Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 16.03 WIB.

Beliau mengatakan "wah kurang tau juga dek, mungkin kendalanya bagian situs nya payah di akses, atau mungkin wisata kita jarang di posting di media sosial sehingga kurang dikenal masyarakat luar kan"

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas bersama bapak Herman selaku masyarakat, maka dapat di analisis bahwa kendala nya dibagian situs nya yang payah di akses. masyarakat ingin postingan wisata Bono ini setiap sebulan sekali selalu di update supaya masyarakat luar bisa melihat keindahan wisata Bono.

Dari observasi yang dilakukan penulis di lapangan bahwa kendala yang sering terjadi adalah dibagian koneksi internet masyarakat yang kurang baik sehingga menjadi payah untuk mengakses informasi wisata Bono. Dan kendala yang kedua dibagian biaya, karena situs resmi yang ada di internet itu berbayar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk indikator Teknologi Komunikasi dan Informasi dapat disimpulkan bahwa indikator Teknologi Komunikasi dan Informasi dapat dikatakan kurang terlaksana. Dinas pariwisata mengatakan banyak cara dalam mempromosikan wisata bono, begitu juga dengan kecamatan dan warga. Namun hasil dari observasi dilapangan media internet masih kurang memposting event-event yang menarik wisatawan, serta postingan yang di internet itu masih postingan lama pada tahun 2017 yang lalu, seharusnya setiap tahun selalu ada pembaharuan supaya masyarakat luar bisa mngetahui perkembangan dari wisata bono tersebut.

E. Hambatan-hambatan dalam Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Wisata Bono

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini yang menjadi hambatan dalam Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Wisata Bono adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan indikator dari Layanan Terintegrasi, pemerintah sudah membuat inovasi pengembangan wisata Bono. Dan sudah dijalankan oleh dinas pariwisata. Kecamatan juga mengetahui inovasi dari pemerintah daerah. Hanya saja pandangan kecamatan masih banyak kendala-kendala dalam pengembangan inovasi tersebut. Sedangkan hasil dari observasi dilapangan tokoh masyarakat dan masyarakat kurang mengetahui inovasi dalam pengembangan objek wisata bono. Jadi dengan demikian dari hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan indikator Layanan Terintegrasi dapat dikatakan kurang terlaksana.

- b. Berdasarkan indikator Desentralisasi layanan dan Monitoring Layanan dapat dikatakan kurang terlaksana, Dapat dilihat dari pemerintah daerah menjanjikan sarana dan prasarana yang layak bagi wisata bono melalui inovasi pengembangan wisata bono. Namun hasil observasi kelapangan, kondisi sarana dan prasarana masih sangat kurang. Dan masyarakat masih belum menerima fasilitas yang baik dan harapan masyarakat pemerintah dapat merenovasi fasilitas yang sudah bisa diganti atau diperbaharui.
- c. Berdasarkan indikator Pemanfaatan Kerjasama dapat dikatakan kurang terlaksana, dinas pariwisata dan kecamatan mengatakan kendala yang dihadapi terjadi karena masyarakat masih kurangnya kesadaran akan pengembangan wisata tersebut. Namun hasil dari observasi dilapangan masyarakat mengatakan yang menjadi kendala dalam kerjasama pengembangan wisata bono karena pemerintah masih kurang memperhatikan akses menuju ke pariwisata dan kurang memperhatikan sarana dan prasarana yang sudah kurang layak di gunakan, dan jarang diperbaharui.
- d. Berdasarkan indikator Pelibatan Warganegara dapat dikatakan kurang terlaksana. Dinas pariwisata dan kecamatan mengetahui peran masyarakat ikut serta dalam membuat atau merumuskan sebuah kebijakan. Namun hasil dari observasi dilapangan masyarakat mengatakan kurang mengetahui peran masyarakat dalam membuat atau merumuskan sebuah kebijakan karena kurangnya pengetahuan atau informasi yang diberikan oleh pemerintah..
- e. Berdasarkan indikator Pemanfaatan Komunikasi dan Informasi dapat dikatakan kurang terlaksana, Dinas pariwisata mengatakan banyak cara dalam

mempromosikan wisata bono, begitu juga dengan kecamatan dan warga. Namun hasil dari observasi dilapangan media internet masih kurang memposting event-event yang menarik wisatawan, serta postingan yang di internet itu masih postingan lama pada tahun 2017 yang lalu, seharusnya setiap tahun selalu ada pembaharuan supaya masyarakat luar bisa mngetahui perkembangan dari wisata bono tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dalam ikut serta memberikan perhatian kepada masyarakat agar masyarakat ikut serta dalam proses pengembangan wisata bono
2. Sarana dan prasarana yang masih kurang layak untuk dinikmati oleh wisatawan, serta akses menuju wisata bono yang masih cukup jauh.
3. Masyarakat kurang mengetahui pihak apa saja yang ikut serta dalam pengembangan wisata bono, masyarakat hanya mengetahui secara umum, sedangkan banyak pihak-pihak lainnya yang ikut serta dalam pengembangan wisata bono.
4. Pemerintah dan masyarakat saling bertolak belakang tentang kendala pengembangan wisata bono. Pemerintah mengatakan masih kurangnya kesadaran masyarakat sehingga menghambat pengembangan wisata bono. Sedangkan masyarakat mengatakan pemerintah kurang memperhatikan wisata bono, kurang perhatian sarana dan prasarana, dan akses menuju ke wisata bono.
5. masih banyaknya kendala dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Salah satunya situs yang berbayar dan kurang postingan-postingan yang terbaru dari wisata bono.

G. Saran

Bersadarkan hal diatas, maka Inovasi Pemerintah Derah Dalam Pengelolaan Wisata Bono penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah daerah lebih serius dalam pengembangan wisata bono sehingga akan lebih baik lagi dan akan menaikkan citra pariwisata bono.
2. Dengan penelitian ini, semoga Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dan masyarakat bisa bersama-sama bekerja sama dalam pengembangan wisata bono.
3. Diharapkan sarana dan prasarana yang ada dan menuju wisata Bono perlu di tingkatkan lebih baik.
4. Diharapkan situs web tentang wisata bono bisa segera di posting event-event baru sehingga menarik perhatian dari masyarakat dalam dan luar daerah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Al Rasyid, Harun. 2010. *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Abdullah-Rasyid, 2001, *Prosiding Seminar IPTEK Kelautan Nasional*, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Jakarta
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Bambang Yulistianto, “*Fenomena Gelombang Pasang Bono di Muara Sungai Kampar*”. Volume 9, Nomor 1, Januari 2009.
- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari buku asli The Social Construction of Reality oleh Hasan Basari)*. Jakarta: LP3ES.
- Dowling, Ross K dan David A. Fennell, 2003, *The Context of Ecotourism policy and planning*, in Dowling Ross K. dan David A. Fennell , *Ecotorism Policy and Planning*. Cambridge, USA, CABI Publishing
- Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto.2010.*Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan E-Governance*.Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Kennedy, John. E; R Dermawan Soemanagara., 2006. Marketing Communication – Taktik dan Strategi. Jakarta. PT Buana Ilmu Populer (kelompok Gramedia) Learned, E., Christensen, C., R., Andrews, K., R. & Guth, W., D. (1965), *Business Policy: Text and Cases*. Irwin: Homewood, IL
- Mulyadi, 2002, “*Pemeriksaan Akuntansi*”, Edisi ke-6, Jakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN Salemba Empat.
- Nugroho, Eko. 2008. *Partisipasi Masyarakat Desa*. Andi: Yogyakarta.
- Porter, M.E. 1985. *Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance : with a new introduction*. The Free Press. New York, USA
- Sangkala.2013.*Innovative Government* , Yogyakarta: Capiya Publishing.

- Spillane J.J,1987,*Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta, Kanisius,150 halaman
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukadji, Soetarlinah. 2000. *Penyusunan dan Mengevaluasi Laporan Penelitian*. Universitas Indonesia Press: Jakarta
- Stephen Robbins. 1994. *Pengertian Inovasi Menurut Para Ahli*. Los Angeles, California, Amerika
- Strong, C.F., 1960, *Modern Political Constitution*, Sidswick & Jacson Limited, London,
- Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Suwantoro. Gamal. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA LAN.
- Syafiie, Inu Kencana, *Sistem Politik Indonesia*, 2008. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana., 2013, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1986; *Perencanaan Pembangunan*, Penerbit PT Gunung Agung Jakarta. Jakarta.
- Tripmo. Tedjo dan Udan. 2005. *Manajemen Strategi*.Bandung: Penerbit. Rekayasa Sains.
- Umar, Husein. 2001. *Strategik Manajemen in Action*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Wahab, Salah. 1975. *Tourism Management*. London : Tourism International Press
- Wardiyanto, 2011, *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*, Lubuk Agung: Bandung.

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Pressindo.

Yoeti. Oka A. 1996. *Pemasaran Pariwisata Terpadu*. Bandung: Angkasa.

Yoeti, Oka A.. 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. PT Pradnya Paramita. Jakarta

Yoeti, Oka A, 2001. *Pemasaran Pariwisata*, Angkasa, Bandung

Yoeti, Oka A, 2005, *Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*, PT Pradnya Paramita: Jakarta

Sumber Lain

<http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-10-tahun-2009-tentang-kepariwisataan.html>

Pengertian Unsur dan Kriteria Masyarakat. 2015. Alamat Website : http://www.organisasi.org/1970/0_1/pengertian-masyarakat-unsurdan-kriteria-masyarakat-dalamkehidupan-sosial-antarmanusia.html

Fenomena Bono di Muara Sungai Kampar. 2009. Alamat Website : <http://tsipil.ugm.ac.id/download/publikasi/bys/Fenomena%20Bono%20di%20Muara%20Sungai%20Kampar%20Bambang%20Yulistiyanto.pdf>

<http://idtraveling.net/2014/07/29/fenomena-7-hantu-seven-ghost-gelombangbono-teluk-meranti/> (diakses pada tanggal 29 Juli 2014)

<https://www.dosenpendidikan.com/21-pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli-terlengkap/>

<https://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/>

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-nasihat/>

<http://xerma.blogspot.com/2014/02/pengertian-inovasi-menurut-para-ahli.html>

<https://www.dosenpendidikan.com/metode-penelitian-kualitatif-pengertian-menurut-para-ahli-ciri-tujuan/>

Dokumentasi

Tesis Inovasi Pelayanan Pengurusan Paspor dikantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian 2013 Pekanbaru, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana

Peraturan daerah kabupaten pelalawan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kabupaten Pelalawan dan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 27 Tahun 2016.